

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

ETNISITAS DAN INTEGRASI

DALAM MASYARAKAT *MULTICULTURAL* KOTA MAKASSAR



TIM PENGUSUL

Dr. Maya Kasmita, S.STP.,M.AP /NIDN. 0018088407 (KETUA)

Yusi Irensi Seppa, SE.,MM / NIDN. 0005098708

St. Syarifah Wafiqah Wardah, SH.,MH / NIDN. 0007089602

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Etnisitas dan Integrasi Dalam Masyarakat Multicultural Kota Makassar

Ketua Peneliti :

- a. Nama Lengkap : Dr. Maya Kasmita, S.STP.,M.AP
- b. NIP/NIDN : 19840818 200312 2 002 / 0018088407
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar
- d. Nomor HP : 081241480800
- e. Alamat Surel (Email) : Mayakasmita@unm.ac.id

Anggota Peneliti (1)

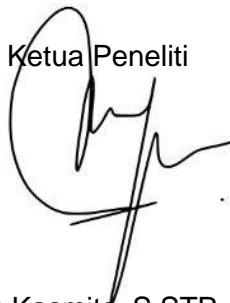
- a. Nama Lengkap : Yusi Irensi Seppa, SE.,MM
- b. NIP/NIDN : 198709052022032007 / 0005098708
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap : St. Syarifah Wafiqah Wardah, SH.M.H
- b. NIP/NIDN : 199608072022032016 / 0007089602
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar

Makassar, 02 September 2024

Ketua Peneliti



Dr. Maya Kasmita, S.STP.,M.AP
NIP. 19840818 200312 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
ABSTRAK	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Pernyataan Masalah	13
1.3 Objektif	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.2 Penelitian Terdahulu.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Desain Penelitian.....	56
3.2 Populasi dan Sampel.....	57
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.4 Teknik Analisis Data	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Hasil Analisis Data Dan Pembahasan	60
4.2 Implikasi	70
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Rekomendasi	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Langkah-langkah Operasional Penelitian	23
Gambar 4.1 Data Penelitian	24
Gambar 4.2 Data Penelitian	25
Gambar 4.3 Data Penelitian	26
Gambar 4.4 Data Penelitian	27
Gambar 4.5 Data Penelitian	28
Gambar 4.6 Data Penelitian	29
Gambar 4.7 Data Penelitian	30
Gambar 4.8 Data Penelitian	31

ABSTRAK

Penelitian Kualitatif. Subjek Penelitian ini di Kota Makassar, melihat Etnisitas dan integrasi dalam masyarakat multicultural Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara etnisitas dan integrasi dalam masyarakat multicultural serta menganalisis dampak integrasi harmoni dan stabilitas dalam konteks masyarakat multi etnis. Dengan penelitian ini dapat membantu memahami dinamika dan interaksi antar etnis di Kota ini serta dampaknya dalam pembentukan identitas dan integrasi serta memberikan wawasan kepada komunitas untuk lebih memahami keberagaman etnis dan memperkuat keterlibatan komunitas dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan menggunakan model interaktif.

Kata kunci : etnisitas, integrasi dan masyarakat multicultural.

ABSTRACT

Qualitative Research. The subject of this research is Makassar City, looking at ethnicity and integration in the multicultural society of Makassar City. The aim of this study to analyze the relationship between ethnicity and integration in a multicultural society while analyzing the impact of integration on harmony and stability in the context of a multi-ethnic society. This research can help understand the dynamics and interactions between ethnic groups in this city and their impact on identity formation and integration as well as provide insight to the community to better understand ethnic diversity and strengthen community involvement in building an inclusive and sustainable society. The data collection method is through interviews and using an interactive model.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertukaran budaya yang lebih cepat melalui media massa, teknologi informasi, dan tren mode. Beberapa aspek yang mencerminkan dampak globalisasi terhadap pertukaran budaya antara lain: media massa, teknologi informasi, tren mode, pertukaran kuliner, Bahasa dan komunikasi, pembentukan identitas global dan lokal (Lukman; Widyastuti, 2024). Dengan demikian globalisasi telah membuka pintu bagi pertukaran budaya yang lebih cepat dan lebih luas. Meskipun ada dampak positif, penting untuk memahami bahwa proses ini juga dapat menimbulkan tantangan, termasuk risiko homogenisasi budaya dan ketidaksetaraan dalam akses representasi. Oleh karena itu, kesadaran dan pengelolaan yang bijak dalam merespons globalisasi budaya menjadi kunci untuk memastikan bahwa keragaman budaya tetap dihormati dan dipelihara.

Dalam Kota Multietnis dapat terjadi konflik budaya yang merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Kebijakan pemerintah yang sebelumnya menggunakan konsep pembauran membuat kebudayaan etnis minoritas harus melebur ke dalam budaya Indonesia sebagai budaya yang dominan. Akibatnya budaya etnis minoritas menjadi hilang atau terbelenggu. Konsep integrasi multicultural ditawarkan sebagai alternatif untuk meredakan konflik antar etnis tersebut. Dengan masyarakat yang multicultural, masing-masing budaya dari etnis yang berbeda saling hidup berdampingan, saling menghargai dan mempelajari satu sama lain. Hal ini berimplikasi pada kesetaraan status budaya dalam semua elemen masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang disebut budaya mayor (dominan) dan budaya minor. Studi kasus tentang gesekan dalam masyarakat multikultural dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan dinamika yang terjadi ketika berbagai kelompok budaya dan agama berinteraksi. Contoh studi kasus yang menggambarkan gesekan dalam masyarakat multikultural biasanya adalah konflik antara kelompok etnis di kota Multikultural.

Menurut (Baidhaw, 2005) Penting untuk diingat bahwa dalam suatu kelompok etnis atau budaya, nilai dan norma budaya dapat bervariasi antara individu dan bahkan kelompok. Di Kota Makassar, yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia, dapat ditemukan perbedaan dalam nilai dan norma budaya antar etnis. Beberapa etnis yang mendiami Kota Makassar antara lain Bugis,

Makassar, Toraja, Mandar dan beberapa kelompok etnis lainnya termasuk Tionghoa.

Setiap etnis mungkin memiliki bahasa atau dialeknya sendiri. Penggunaan bahasa dan norma komunikasi dapat bervariasi, meskipun bahasa Indonesia umumnya digunakan sebagai bahasa resmi. Setiap etnis memiliki adat istiadat dan tradisi unik mereka sendiri. Misalnya perayaan hari besar agama, upacara adat, dan ritual keagamaan dapat berbeda antar etnis. Perbedaan nilai dan norma budaya juga dapat tercermin dalam pekerjaan dan mata pencaharian. Beberapa kelompok mungkin cenderung terlibat dalam sektor pertanian, sementara yang lain lebih cenderung bekerja di sektor perdagangan atau industri, etika dan norma sosial, termasuk norma yang berkaitan dengan kejujuran dan kepercayaan, serta keterlibatan dalam masyarakat, dapat bervariasi diantara kelompok etnis.

Perbedaan nilai dan norma budaya antar etnisitas dan integrasi dalam masyarakat multicultural di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dapat mencerminkan dinamika kompleks dari berbagai kelompok etnis yang mendiami Kota ini. Pentingnya untuk diteliti bahwa **perbedaan ini tidak selalu berarti konflik** atau ketegangan; sebaliknya, mereka menciptakan keanekaragaman dan potensi untuk pembelajaran dan pertukaran budaya. Integrasi sukses di Kota Makassar melibatkan penghormatan terhadap perbedaan dan upaya bersama untuk membangun masyarakat multicultural yang harmonis (Siti, 2023). Saling pengertian dan dialog antar-etnis juga merupakan kunci untuk mencapai integrasi yang positif. Pengalaman diskriminasi atau mendapat stereotip negatif dari orang lain dapat secara signifikan merintangi integrasi etnis di Kota Makassar.

Apabila Kelompok etnis merasa terus menerus diskriminatif mereka mungkin cenderung membentuk kelompok tertutup sebagai suatu cara untuk melindungi diri dari pengalaman negatif. Hal ini menghambat interaksi dan integrasi kelompok dengan etnis lainnya. Saat ini, sisa-sisa feodalisme masih kelihatan nampak dalam hierarki struktur sosial dengan adanya upaya pembagian kelas antara kelompok bangsawan (dengan sebutan "Andi", "Karaeng", atau semacamnya) dengan kelompok yang bukan bangsawan. Para keturunan bangsawan tersebut saat ini masih mempunyai pengaruh dan peran di Sulawesi Selatan, termasuk halnya pada pemerintahan lokal. Perlu diketahui bahwa

menurut sejarahnya pemberian gelar-gelar kebangsawanan seperti “Andi”, “Daeng, dan “Karaeng” merupakan peninggalan masa lalu merupakan pemberian dari pemerintahan kolonial Belanda. Adapun pengembangan egalitarianisme dan demokratisasi di wilayah itu khususnya di wilayah Bone yang tradisi kebangsawannya masih kuat dan masyarakatnya relatif dapat dikatakan homogen dibanding Makassar terhambat salah satunya oleh hierarki sosial yang telah mentradisi dan telah ada setelah ratusan tahun lamanya (Sya’ban Andi Hilda, 2020).

Dominasi budaya Makassar yang orang-orangnya mereka kenal memiliki sifat khas emosional, membuat etnis masyarakat ini memiliki sikap toleran bahkan cenderung tertutup. Merujuk pada (S.Bekti, 2018) bahwa identitas suatu kelompok mempengaruhi cara anggotanya berkomunikasi, maka nilai budaya „siri” (harga diri/malu) terbawa dalam proses interaksi baik di lingkup kelompoknya maupun di luar kelompoknya. Etnis Makassar misalnya, memiliki ragam pengidentifikasian oleh etnis lain. Sebagian menilai karakter orang Makassar cenderung kasar, emosional, kolot dan cepat marah. Adapula yang menilai cukup sopan dan jujur (TAHIR, 2013) Keragaman stereotip tersebut salah satunya berkaitan dengan faktor pengalaman interaksi individu etnis lain dengan orang-orang Makassar.

Pada masa lalu masyarakat Bugis-Makassar memiliki sistem kemasyarakatan atau pelapisan sosial yang terbagi kedalam tiga tingkatan atau yang biasa disebut dengan sebutan “kasta”. **Pertama**, Ana Karaeng (Makassar), tingkatan kasta ini merupakan tingkatan kasta tertinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat. Kasta ini merupakan kasta yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan kalangan raja-raja yang mempunyai kekuasaan serta menguasai perekonomian dan pemerintahan. **Kedua**, Tu Maradeka (Makassar), kasta kedua ini dalam sistem kemasyarakatan BugisMakassar merupakan kumpulan masyarakat atau orang-orang yang merdeka (bukan budak atau ata). Pada umumnya masyarakat BugisMakassar mayoritas berstatus pada kasta kedua ini. **Ketiga**, Ata. Kasta ini merupakan kasta yang paling rendah dalam strata sosial masyarakat. Ata atau kasta ini adalah masyarakat yang merupakan budak atau abdi yang biasanya diperintah oleh kasta pertama dan kedua. Pada umumnya mereka menjadi budak lantaran tidak mampu membayar utang, melanggar

pantangan adat, dan lain sebagainya.

Masyarakat Bugis-Makassar secara keseluruhan, dan masyarakat kota Makassar khususnya, juga memiliki etika yang mengatur dalam kehidupan, yaitu sangat menghargai tata krama atau sopan santun yang dikenal dengan sipakalebbi yang artinya adalah sifat saling tolong-menolong, sipakatauyang artinya saling menghargai sebagai sesama manusia, dan sipakainga yang artinya saling mengingatkan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang atau masyarakat dituntut atau diharuskan untuk memperlakukan orang lain dengan baik dan sopan, memiliki sifat tolong menolong, saling menghargai, serta saling mengingatkan. Akan tetapi, jika ada orang atau anggota masyarakat yang tidak bisa memperlakukan orang lain dengan cara-cara tadi atau tidak berpedoman kepada sipakalebbi, sipakatau, dan sipakainga, maka yang bersangkutan akan mendapat balasan dengan lebih tidak sopan lagi dan diperlakukan secara anarkis. Agama juga memainkan peran yang signifikan dalam masyarakat multikultural dengan cara yang kompleks dan beragam. Masyarakat kota Makassar menganut agama yang beragam, dengan mayoritas bergama Islam. Penduduk Makassar mayoritas beragama Islam sebanyak 87,19%. Selanjutnya penduduk yang menganut agama Kekristenan sebanyak 11%, dengan rincian Protestan sebanyak 8,17%, dan Katolik sebanyak 2,83%. Penganut agama Buddha sebanyak 1,27%, kemudian Hindu sebanyak 0,14%. Selebihnya sebanyak 0,40%, termasuk agama Konghucu, dan aliran kepercayaan (Data dari Sensus Penduduk, 2010).

Salah satu paguyuban kelompok-kelompok berdasarkan etnis atau kedaerahan yang ada di wilayah kota Makassar adalah kelompok atau paguyuban “Bosowa”, yaitu kumpulan orang-orang yang berasal dari Bone, Soppeng, dan Wajo. Perkumpulan lainnya adalah “Bosowasipalu” yang merupakan kumpulan orang-orang yang berasal dari Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, Palopo, dan Luwu (Rochmawati, 2017). Seperti telah diuraikan di atas kegiatannya lebih bersifat sosial dan perlu diketahui juga bahwa solidaritas kedaerahannya sangat kuat.

Berbeda dengan keberadaan etnis Tionghoa konflik yang bersumber dari kesenjangan social dan ekonomi yang dapat dilihat secara nyata. Dapat diperkirakan bahwa sector ekonomi kota Makassar dikuasai oleh etnis Tionghoa sebanyak 70%. Demikian pula dengan sektor kehidupan sehari-hari sangat tampak konflik social secara social psikologis disebabkan dengan cara hidup etnis tionghoa yang eksklusif dengan hidup secara berkelompok. (Isnaeni Dian I, 2018). Seperti penelitian (M. Darwis, 2013) bahwa secara simbolik etnis keturunan Tionghoa memelihara budaya leluhur yang ditandai dengan adanya

kecenderungan golongan etnik keturunan Tionghoa untuk menciptakan suatu lingkungan tersendiri, hidup secara eksklusif dan tetap mempertahankan adat kebiasaan kebudayaan dari tradisi leluhur, membanting tulang sambal menyembah arwah. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka terciptalah jarak atau pembatas yang menyebabkan tidak terjadinya interaksi sosial yang harmonis, dan menyebabkan putusnya hubungan komunikasi.

Mengantisipasi masuknya kelompok etnis baru ke Kota Makassar merupakan langkah penting untuk menjaga integrasi sosial yang lancar dan menghindari konflik. Beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu: (1) Perencanaan kota yang inklusif terdiri dari penataan wilayah serta fasilitas publik dan Pemanfaatan ruang-ruang publik dari kegiatan-kegiatan kebudayaan; (2) Penguatan kebijakan integrasi sosial terdiri dari kebijakan kewarganegaraan dan program sosialisasi; (3) Pendidikan dan kesadaran melalui pelatihan multikultural dan kurikulum sekolah; (4) Keterlibatan masyarakat terdiri dari dialog antar etnis dan partisipasi komunitas; (5) Penyediaan layanan dan dukungan terdiri dari layanan konsultasi dan dukungan kesejahteraan; (6) Pengawasan dan evaluasi yang terdiri dari pemantauan dan penyesuaian kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan yang proaktif dan inklusif, Kota Makassar dapat menghadapi peningkatan etnis baru dengan cara yang positif dan konstruktif, yang akan menghasilkan stabilitas dan kemakmuran bagi setiap penduduknya.

Faktor yang mempengaruhi status sosial dalam etnis pada masyarakat Kota Makassar menurut (Ahmadin, 2013) antara lain: **Keturunan dan Garis keturunan**, dimana beberapa keluarga atau kelompok masyarakat Bugis-Makassar masih memandang keturunan sebagai faktor yang menentukan status dan hak istimewa, **Keberhasilan Ekonomi**, seperti memiliki usaha yang sukses merupakan perolehan dari turun temurun seringkali memberikan kehormatan dan pengaruh, **Prestasi Masyarakat Adat**, misalnya partisipasi aktif dalam upacara adat atau peran penting dalam kehidupan masyarakat adat dapat memberikan pengakuan social, serta **Pengaruh Politik dan Kepemimpinan** yang signifikan dalam menentukan status social.

Keanekaragaman Etnis di Kota Makassar dimana Kota Makassar dikenal sebagai Kota yang memiliki keanekaragaman etnis dan budaya, penelitian ini dapat membantu memahami dinamika dan interaksi antar etnis di Kota ini serta dampaknya dalam pembentukan identitas dan integrasi. Ditekankan dalam penjelasan Visi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar, dimana Perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis “Bugis Makassar” yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Sombere’ berkaitan dengan Heartware atau “Perangkat Hati”, sedangkan Smart

City berkaitan dengan *Hardware* dan *Software* atau “Perangkat Keras” dan “Perangkat Lunak”. Diharapkan dengan Sombere’ dan *Smart City* menjadikan Makassar Kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya lokal. Hal ini dapat menjadi tujuan real dalam perwujudan etnisitas mempengaruhi proses integrasi individu dalam masyarakat multicultural serta integrasi harmoni dan stabilitas dalam konteks masyarakat multietnis di Kota Makassar.

Pengembangan program pendidikan hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang program pendidikan yang mendukung pemahaman dan toleransi antar etnis di sekolah dan lembaga pendidikan. Program ini dapat membantu membentuk pola pikir inklusif dikalangan generasi muda. Pemberdayaan komunitas lokal dikalangan generasi muda dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada komunitas untuk lebih memahami keberagaman etnis dan memperkuat keterlibatan komunitas dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Melatar belakangi hal tersebut adalah di tetapkannya hari kebudayaan Kota Makassar yang ditetapkan pada tanggal 1 April setiap tahunnya. Pemerintah Kota Makassar menjadikan momentum untuk menanamkan dan menghidupkan berbagai unsur kebudayaan daerah maupun Nusantara di tengah masyarakat Makassar.

Target kepada generasi muda dengan melihat tantangan globalisasi, kota makassar seperti banyak kota di dunia, mengalami dampak globalisasi yang dapat mempercepat pertukaran budaya dan nilai-nilai. Penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul akibat globalisasi. Kontribusi terhadap pengetahuan akademi diharapkan dalam penelitian ini dapat berkontribusi pada literature akademis mengenai etnisitas, integrasi dan masyarakat multicultural, membuka ruang untuk meneliti lebih lanjut dalam bidang ini.

Menurut Walikota Makassar Bapak Moh. Ramdhan Pomanto dalam <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/1-april-jadi-hari-kebudayaan-makassar-ini-alasannya?page=all> “Budaya menjadi Identitas dan pemersatu kita. Hari ini kita kelihatan sangat hebat karena kebudayaan lokal dan nasional”. Alasan ditetapkannya tanggal 1 April sebagai hari Kebudayaan Kota Makassar karena tanggal 1 April menandai nama Makassar menggantikan nama Ujung Pandang pada tahun 1999. Hari kebudayaan diklaim yang pertama di Indonesia, ini sekaligus menegaskan posisi Kota Makassar sebagai rumah budaya Nusantara yang dikenal ke mancanegara. Hal tersebut terkait dengan Misi Kota Makassar untuk Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua. Dimana dalam misi tersebut diuraikan dengan meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan

Realisasi Investasi, serta Meningkatkan Citra Kota Makassar (*City Branding*) Sebagai Destinasi Wisata Gastronomi, Sejarah, Budaya dan Kegiatan MICE (*meeting incentives, conventions and exhibitions*) pendorong utama pengembangan destinasi pariwisata dan juga merupakan penghasil pendapatan yang penting bagi masyarakat lokal, mencipta lapangan kerja dan pendorong berkembangnya investasi asing.

1.2. Peryataan Masalah

1. Etnisitas mempengaruhi proses integrasi individu dalam masyarakat multicultural Kota Makassar.
2. Hubungan antara integrasi individu dengan harmoni dan stabilitas dalam masyarakat multicultural Kota Makassar.

1.3. Objektif

1. Menganalisis pengaruh antara etnisitas dan integrase dalam masyarakat multicultural Kota Makassar.
2. Menganalisis hubungan integrase individu dengan harmoni dan stabilitas masyarakat multicultural Kota Makasar.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis mempunyai manfaat jangka Panjang dalam pengembangan teori serta model yang serupa, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen dalam penelitian ini.

Manfaat Praktis :

- Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi untuk membantu dalam pengembangan teori ataupun model yang berhubungan dengan etnisitas dan integrase dalam masyarakat multicultural.
- Hasil penelitian ini dapat dijadikan Pemerintah Kota Makassar dalam mendapatkan informasi dalam mewujudkan Makassar menjadi “*Livable City*” dan “*Resilent City*” dan meningkatkan Kualitas infrastruktur Kota yang Nyaman dan Inklusif, serta meningkatkan Tata Kelola Hidup yang lestari.

1.5.Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN : Dalam Bab ini membahas mengenai Latar belakang, Pernyataan Masalah, Obyektif, Manfaat Penelitian dan Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Dalam Bab ini membahas mengenai Landasan Teori serta Penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN : Dalam Bab ini membahas mengenai Desain Penelitian, Populasi dan sample, Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : Dalam Bab ini membahas mengenai Hasil Analisis Data dan Pembahasan serta Implikasinya.

BAB V PENUTUP : Dalam Bab ini membahas mengenai Kesimpulan serta Rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori Integrasi Sosial

Integrasi sosial merujuk pada rangkaian konsep dan pandangan yang mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana individu atau kelompok dapat diintegrasikan ke dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial. Teori ini mencakup pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi, dinamika interaksi sosial, dan bagaimana masyarakat membangun kesatuan dan koherensi.

Emile Durkheim (Durkheim, 1972), menekankan pentingnya fungsi-fungsi sosial untuk mempertahankan stabilitas masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa integrasi sosial terjadi melalui adanya kesepakatan tentang nilai-nilai dan norma-norma Bersama yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Sama halnya dengan teori konflik yang dikembangkan tokoh-tokoh seperti Karl Marx, Max Weber dan Ralf Dahrendorf, fokus pada ketidakselarasan dan konflik dalam masyarakat. Integrasi sosial, dalam konteks ini, melibatkan distribusi kekuasaan dan sumber daya secara adil untuk mencegah ketegangan yang merusak stabilitas sosial. Pertukaran sosial berfokus pada hubungan suatu bentuk pertukaran. Integrasi sosial dipandang sebagai hasil dari ketergantungan dan keuntungan Bersama dalam interaksi sosial. Teori ini menekankan pertukaran norma dan nilai sebagai bagian dari proses integrasi.

Norma-norma sosial yang jelas dan tegas di satu sisi dan stabilitas faktor-faktor ekonomi dan sosial dalam masyarakat di sisi lain dapat mencegah penyebaran kejahatan, khususnya korupsi (Indahni, Amelia;Casanti, 2022) menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan dalam kegiatan sosial sebagai sarana untuk mencapai integrasi. Aktivitas dan partisipasi dapat memperkuat ikatan sosial dan saling ketergantungan antarindividu. Konstruksi sosial berfokus pada pemahaman bahwa realitas sosial dibangun melalui interpretasi dan makna yang diberikan oleh individu dan kelompok. Integrasi sosial dipandang sebagai konstruksi sosial yang dipahami dan dibangun bersama dalam masyarakat.

Indikator terciptanya integrasi sosial dalam masyarakat antara lain :

- a. Individu individu yang berasal dari kelompok/ golongan yang berbeda dapat bekerjasama memenuhi kebutuhan bersama tanpa halangan
- b. Dicapai consensus bersama mengenai nilai-nilai dasar yang dijadikan acuan utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut (Martono, 2012) Teori posmodernisme menentang pandangan tradisional tentang integritas social dan menekankan pluralitas, keragaman dan fragmentasi dala masyarakat. Dalam kerangka ini integritas dapat dianggap sebagaihasil dari negosiasi antara berbagai kepentingan dan identitas. Setiap teori memberikan oandangan unik terhadap integrase social dan penggunaan atau kombinasi teori-teori ini daoat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan konteks dan tujuan penelitian atau analisis sosial.

Teori Integrasi Sosial dan Teori Kebudayaan

Istilah integrasi berasal dari bahasa latin *integrare* yang memiliki arti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dari kata kerja itu dibentuk kata benda integrasi artinya keutuhan atau kebulatan. Maka, istilah integrasi mengisyaratkan tentang berbagai macam elemen yang berbeda satu sama lain mengalami proses pembauran sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Dan integrasi sosial mengacu pada suatu keadaan dalam masyarakat dimana orang-orang saling berhubungan. Menurut Ogburn dan Nimkoff integrasi merupakan suatu ikatan berdasarkan norma, yaitu karena norma kelompoklah merupakan unsur yang mengatur tingkah laku, dengan mengadakan tuntutan tentang bagaimana integrasi berhasil apabila anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain, apabila tercapai semacam consensus mengenai norma sosial, apabila norma-norma cukup lama dan tidak berubah-ubah.

Secara sosiologis, teori integrasi sosial merupakan bagian dari paradigma fungsionalisme struktural yang diperkenalkan Talcott Parson (1927-1979). Paradigma ini mengandaikan bahwa pada dasarnya masyarakat berada dalam sebuah sistem sosial yang mengikat mereka dalam keseimbangan (ekuilibrium). Durkheim dalam studi tentang integrasi sosial menjelaskan bahwa integrasi sosial dapat terwujud jika terjadi saling ketergantungan antara bagian yang terspesialisasikan. Dalam hal ini solidaritas didasarkan atas kesamaan dalam kepercayaan dan nilai yang saling bergantung secara fungsional dalam masyarakat yang heterogen. Kesamaan dalam kepercayaan dan nilai ini akan memberi kesadaran kolektif untuk menciptakan kesatuan.

Integrasi sosial memiliki dua unsur pokok, yang pertama sebagai

pembauran dan penyesuaian dan yang kedua ialah unsur fungsional. Kedua unsur ini sama-sama memiliki inti dari integrasi sosial yang terjadi dalam kemajemukan sosial. Masalah integrasi menunjuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional yang cukup menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerja sama dikembangkan dan dipertahankan.

Kemajemukan sosial dapat kita jumpai pada masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat pedesaan digambarkan sebagai masyarakat yang memiliki karakteristik sopansantun, selalu mematuhi nilai-nilai serta norma-norma sosial yang ada, memiliki semangat untuk saling membantu, serta mengutamakan keharmonisan dari pada sebuah konflik, walaupun tidak menutup kemungkinan juga dalam masyarakat desa pasti terjadi konflik. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan digambarkan sebagai masyarakat yang individualis akibat dari persaingan yang terjadi serta memiliki sifat yang egois akibat dari sikap individualis. Kemajemukan dipahami menjadi karakteristik dari masyarakat sekuler, karena itu masyarakat sekuler juga dipahami sebagai masyarakat yang bebas. Kemajemukan yang ada dengan adanya berbagai denominasi golongan gereja dihimpun atau disatukan. Peringatan terhadap bahaya pengkotak-kotakan golongan di dalam masyarakat yang dapat mengakibatkan timbulnya eksklusivisme.

Menurut Forrest dan Kearns ranah-ranah kohesi sosial adalah (1) nilai-nilai bersama dan sebuah budaya warga (*civic culture*), (2) keteraturan sosial dan kendali sosial, (3) solidaritas sosial, (4) jejaring sosial dan modal sosial, serta (5) kelekatan dan identifikasi pada tempat (*place attachment and identity*). Dalam sosiologi, konsep kebudayaan (*culture*) sangat penting. Menurut Koentjaraningrat, suatu kelompok masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan. Selo Soemardjan dan Solaeman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.

Asal usul konsep kebudayaan dapat dilihat dari tipologi empat lapis. (1) kebudayaan sebagai sesuatu yang rasional, atau tentu saja sebuah kategori kognitif: kebudayaan menjadi dapat dijelaskan dan dipahami sebagai suatu keadaan pemikiran umum. Konsep ini mengandung ide penyempurnaan, sebuah tujuan atau aspirasi tentang prestasi atau emansipasi individu. Di satu sisi kebudayaan dapat merupakan sebuah refleksi dari suatu filsafat yang sangat individualis dan di sisi lain adalah contoh sebuah komitmen filosofis terhadap pertikularitas dan perbedaan, bahkan keistimewaan atau superioritas umat manusia. (2) kebudayaan sebagai sebuah kategori yang lebih maujud dan kolektif: kebudayaan berarti sebuah keadaan perkembangan intelektual dan /atau moral di dalam masyarakat. Pandangan ini mengadopsi kebudayaan ke dalam ranah kehidupan kolektif, bukan ke dalam kesadaran individu. (3) kebudayaan adalah

sebuah kategori deskriptif dan konkret: kebudayaan dipandang sebagai sekumpulan besar karya seni dan karya intelektual di dalam suatu masyarakat tertentu. (4) kebudayaan adalah sebuah kategori sosial: kebudayaan dipandang sebagai seluruh cara hidup yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat: ini adalah pengertian budaya yang bersifat pluralis dan berpotensi demokratis yang telah menjelma menjadi titik perhatian dalam sosiologi dan antropologi dalam pengertian yang lebih lokal.

Kebudayaan juga dapat dilihat sebagai hasil karya, rasa dan cipta masyarakat yang diperlukan untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Wujud dari kebudayaan setidaknya mempunyai tiga wujud. Pertama, wujud ideel. Sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau difoto. Kebudayaan ideel ini dapat kita sebut yang adat tata kelakuan, atau secara singkatnya adat dalam arti khusus, atau adat istiadat dalam bentuk jamaknya. Kebudayaan ideel ini berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Kedua, wujud dari kebudayaan yang sering disebut sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu dengan yang lain dari detik ke detik, hari ke hari dan dari tahun ke tahun, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Ketiga, wujud dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik. Seluruh total dari hasil fisik melalui aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka sifatnya paling konkret, dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto. Ketiga wujud dari kebudayaan tersebut terurai dalam kenyataan kehidupan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kebudayaan ideel dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia. Baik pikiran-pikiran dan ide-ide, maupun perbuatan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya. Sebaliknya, kebudayaan fisik itu membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya, sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga mempengaruhi cara berpikirnya.

Proses terjadinya kebudayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menggerakkan manusia untuk menghasilkan kebudayaan. Ada yang bersifat pengaruh, bersifat syarat, ataupun hanya melenyapkan penghambat-penghambat untuk menciptakan kebudayaan. Alam menjadi partner manusia di dalam usahanya mencapai kemanusiaan mulia dan memuliakan alam. Faktor-faktor kebudayaan membentangkan interaksi dan interplay manusia dan alam yang begitu kompleks itu. Alam sekitar mendorong manusia untuk memperkembangkan

daya budinya dengan akibat, bahwa dia sendiri menciptakan alam sekitarnya. Faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terjadinya kebudayaan antara lain, faktor intern: evolusi dan degenerasi; faktor ekstern: biome (alam organis, demografi, ras), habitat (topologi, iklim) dan lingkungan sosial.

Theodorson dalam Pelly mengemukakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Dalam bukunya koentjaraningrat, sistem nilai-budaya merupakan tingkat yang paling abstrak terdiri dari konsepsi-konsepsi dan hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu, suatu sistem nilai-budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. *Culture value system* banyak dipakai dalam ilmu-ilmu sosial, yang terutama memfokus kepada kebudayaan, masyarakat dan baru secara sekunder kepada manusia sebagai individu dalam masyarakat.

Dalam konteks kemajemukan yang telah menjadi jati diri bangsa Indonesia, maka terminologi rukun atau kerukunan adalah kata kunci yang amat penting. Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, rukun adalah perihal hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong dan persahabatan. Kerukunan merupakan kondisi dan proses terciptanya interaksi yang beragam di tengahnya kehidupan masyarakat. Kerukunan harus dilandasi dengan kesadaran untuk mempunyai kesamaan tanggung jawab dan keterpanggilan dalam memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan bagi semua orang. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidak rukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tentram.

Dalam terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup antar umat beragama ada tiga kerukunan yang disebut dengan istilah "Trilogi Kerukunan" yaitu: a). Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama. Kerukunan di antara aliran-aliran/ paham yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama. b). Kerukunan di antara umat/komunitas agama berbeda-beda. Kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda, yaitu diantara pemeluk islam dengan pemeluk kristen protestan, katolik, hindu dan budha. c). Kerukunan antar umat/komunitas agama dengan pemerintah. Terdapat keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa indonesia yang beragama. Dengan demikian kerukunan merupakan jalan hidup dari masing-masing individu yang terikat pada agama maupun golongan untuk hidup bersama, memelihara hubungan dengan sesama, saling menghormati dan saling bekerja

sama.

Dalam menjaga kerukunan yang telah terbentuk diperlukan suatu usaha yang harus dilakukan. Usaha tersebut dapat berupa bentuk-bentuk kerukunan yang dilakukan melalui aksi sosial. Seperti, pemeriksaan kesehatan, gotong royong, dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam skala yang lebih luas bentuk kerja sama yang bersifat kemanusiaan, memerlukan dana dan tenaga yang banyak, maka semua gereja berpartisipasi.

Mapalus adalah sebuah bentuk kebudayaan yang direalisasikan melalui kegiatan saling membantu yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Kegiatan Mapalus sampai saat ini masih dilakukan masyarakat suku Minahasa. Kegiatan Mapalus yang dilakukan oleh kelompok masyarakat beragam, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kelompok Mapalus yang ada pada suatu daerah. Dalam masyarakat desa struktur sosial mempunyai ciri tersendiri yaitu, bersifat gotong royong, mengutamakan kebersamaan, tidak ada spesialisasi dalam pembagian kerja dan lain-lain. Kegiatan Mapalus dalam bidang pertanian misalnya, anggota Mapalus membantu dalam pemotongan padi di sawah

Teori Identitas dan Etnisitas

Teori identitas social dikembangkan pada tahun 1970-an. Identitas social menurut Henri Tajfel adalah pengetahuan bahwa seseorang memiliki suatu lingkungan social atau kelompok. Teori identitas social merupakan akumulasi nilai-nilai kelompok yang disesuaikan kedalam konsep diri. (Tajfel, 2010) Tajfel mendefinisikan identitas social sebagai pengetahuan seseorang terhadap keanggotaan didalam suatu kelompok bersama dengan nilai dan emosi yang dirasakan didalamnya.

Teori identitas social juga menyatakan bahwa dengan adanya identitas mampu menggolongkan anggota ke dalam kelompok. Teori identitas social merupakan upaya bagaimana seorang anggota menaikkan posisi dirinya dan posisi kelompoknya. Tajfel dan Turner (1979) menyatakan bahwa identitas sosial seseorang ditentukan dari kelompok mana ia tergabung. Sehingga seseorang akan termotivasi untuk bergabung dengan kelompok yang dianggap menarik dan dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang bergabung. Selain itu melihat bahwa individu akan berjuang untuk mempertahankan identitas social yang positif, sehingga ketika identitas social mulai dipandang tidak memuaskan, maka mereka akan mulai mencari kelompok yang dianggap lebih memuaskan, lebih nyaman dan lebih menyenangkan (POLUAKAN, Marcelino Vincentius, 2019).

Etnisitas membahas bagaimana individu membentuk dan mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam konteks kelompok etnis tertentu. Identitas etnis mengacu pada cara individu mengaitkan diri mereka dengan kelompok etnis

tertentu dan bagaimana identitas ini membentuk persepsi diri dan hubungan sosial mereka. (Barth, 1993) yang melihat pembentukan kelompok etnis sebagai sistem pemberian sinyal, untuk menempatkannya dalam kerangka kerja yang mengacu kepada tindakan kolektif dan teori-teori pemberian sinyal lainnya. Dari perspektif ini pemberian isyarat etnis meskipun merupakan hukuman yang mahal bagi anggota kelompok namun merupakan salah satu bentuk komunikasi efektif yang memfasilitasi pengelolaan sumber daya secara kolektif.

Menurut (Rumahuru, 2020) Teori Konstruksi identitas berpendapat bahwa identitas adalah konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi dan pengaruh konteks sosial (Ahmadi, 2008). Identitas etnis dianggap sebagai hasil dari proses konstruksi sosial yang melibatkan bahasa, simbol, dan makna bersama yang diberikan oleh masyarakat. Hal tersebut menekankan individu memiliki kebebasan untuk memilih dan mengkonstruksi identitas mereka. Termasuk identitas etnis. Pilihan identitas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman pribadi, nilai-nilai dan aspirasi individu.

Teori peran menyarankan bahwa identitas etnis dapat dilihat sebagai peran sosial yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat. Identitas ini mungkin diperankan sesuai dengan harapan dan norma-norma kelompok etnis yang bersangkutan (Harahap, 2020). Pada peran proses kognitif, seperti persepsi dan pembelajaran sosial, dalam pembentukan identitas etnis. Individu belajar tentang identitas etnis mereka melalui interaksi dengan anggota kelompok etnis dan pengaruh lingkungan sosial.

Adanya pendapat bahwa identitas etnis dapat diperkuat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan dan komunitas sosial, dengan begitu individu dapat memperoleh pemahaman lebih tentang identitas etnis mereka. Seperti persepsi dan pembelajaran sosial bagi individu, melalui interaksi dengan anggota kelompok etnis dan pengaruh lingkungan sosial.

Stigma dan identitas meneliti bagaimana stigma atau stereotip yang terkait dengan kelompok etnis tertentu dapat mempengaruhi pembentukan identitas individu. Individu mungkin merespon stigma dengan cara yang memperkuat atau mengubah identitas etnis mereka. Stigma merujuk pada atribut negatif atau label yang melekat dalam konteks identitas etnis. Stigma seringkali terkait dengan stereotip, prasangka, atau diskriminasi yang ditujukan kepada kelompok etnis tertentu.

Teori Identitas

Identitas mengacu pada karakter khusus individu atau anggota suatu kelompok atau kategori sosial tertentu. Identitas berasal dari kata "idem" dalam bahasa Latin yang berarti sama. Dengan demikian identitas mengandung makna kesamaan atau kesatuan dengan yang lain dalam suatu wilayah atau hal-hal tertentu, selain

mengandung makna kesamaan, identitas juga mengandung makna perbedaan. Identitas dapat juga bermakna suatu karakter yang membedakan suatu individu atau kelompok dari individu atau kelompok lainnya. Dengan demikian identitas mengandung dua makna, yaitu hubungan persamaan dan hubungan perbedaan. Hubungan persamaan dalam identitas muncul ketika suatu individu mempunyai kesamaan dengan individu lain dalam suatu kelompok. Hubungan perbedaan dalam identitas muncul ketika suatu individu atau kelompok mempunyai suatu karakter tertentu yang membedakan individu atau kelompok tersebut dari individu atau kelompok lainnya (Rummens dalam Santoso, 2006 : 45).

Identitas yang dimiliki oleh seorang individu dapat berupa identitas personal (*personal identity*) dan identitas sosial (*social identity*). Identitas personal merupakan hasil dari suatu identifikasi diri, oleh dirinya sendiri, dengan penilaian dari orang lain. Identitas personal merupakan suatu karakter tertentu yang dimiliki oleh seorang individu yang membedakan dari orang lain. Identitas personal dapat berupa ciri-ciri fisik seperti wajah dan tinggi badan, atau ciri psikologis seperti sifat, tingkah laku, dan gaya bicara. Identitas sosial merupakan hasil dari identifikasi diri oleh orang lain, dan merupakan suatu identifikasi yang disetujui atau diberikan seorang pelaku sosial (*social actor*) kepada seorang individu (Rummens dalam Santoso, 2006 : 45). Secara lebih jelas, identitas sosial merupakan suatu pengetahuan dan pengakuan diri individu sebagai anggota suatu kelompok serta pengakuan kelompok kepada individu tersebut sebagai anggotanya (Giles dan Johnson, 1987 : 69).

Teori identitas sosial adalah teori yang dikembangkan oleh Henry Tajfel dan John Turner. Teori Identitas sosial merupakan sebuah analisis psikologi sosial mengenai proses pembentukan konsep diri dalam konteks keanggotaan di dalam kelompok, proses-proses yang berlangsung dalam kelompok, dan hubungan-hubungan yang terjadi antar kelompok. Pendekatan ini secara eksplisit dibentuk oleh keyakinan bahwa perilaku kolektif tidak dapat dipahami dan dijelaskan semata-mata dengan merujuk pada proses - proses yang terjadi di level individu atau interaksi individu, melainkan lebih ditentukan oleh seperangkat nilai, aturan, atribut, atau pola perilaku yang berkembang serta terbagikan secara kolektif dalam sebuah kelompok (Afif, 2015:02).

Dalam perspektif teori identitas sosial, perilaku individu tidak lagi ditentukan oleh pilihan bebasnya sebagai agen yang berdiri sendiri, melainkan muncul dari identifikasi diri sebagai bagian dari kelompok yang menaunginya. Dengan demikian, identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya selama berada di dalam kelompok melalui mana dia secara sengaja menginternalisasikan nilai-nilai, turut berpartisipasi, serta mengembangkan rasa peduli dan kebanggaan terhadap kelompoknya (Afif,

2015:02).

Identitas sosial adalah ciri atau keadaan khusus dari suatu kelompok. Hal ini merupakan indikasi bahwa individu memang tak bisa lepas dari pengaruh lingkungan. Hogg dan Abrams (dalam Nuraeini, 2005) menjelaskan identitas sosial sebagai rasa keterikatan, peduli, bangga dapat berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan sosial dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memiliki hubungan personal yang dekat mengetahui atau memiliki berbagai minat. Henry Tajfel adalah salah satu tokoh teori identitas sosial. Tajfel mendefinisikan identitas sosial sebagai pengetahuan individu dimana seseorang merasa sebagai bagian anggota kelompok yang memiliki kesamaan emosi serta nilai (Nuraeni, 2005). Identitas sosial juga merupakan konsep diri seseorang sebagai anggota kelompok. Identitas bisa berbentuk kebangsaan, ras, etnik, kelas pekerja, agama, umur, gender, suku, keturunan, dan lain-lain.

Konsep Identitas

Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang/ jati diri. Secara psikologis, definisi identitas diri secara umum adalah sebuah kelanjutan menjadi seseorang yang tunggal dan pribadi yang sama, yang dikenali oleh orang lain. Dalam perspektif psikologi kepribadian, identitas diri merupakan suatu konsep yang digunakan untuk membedakan individu satu dengan individu lainnya. Dengan demikian, identitas diri adalah suatu pengertian yang mengacu pada identitas spesifik dari individu. Identitas diri bisa disebut kesadaran diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam perspektif psikologi sosial, identitas diri merupakan ide mengenai image yang dimiliki seseorang. Konsep identitas merupakan pertanyaan ke arah diri sendiri atau self yang menekankan bahwa identitas dibentuk oleh mereka sendiri. Konsep kedua adanya pertanyaan mengenai kesamaan atau "sameness" yang merupakan suatu pertanyaan dari aspek sosiologi, di mana identitas lainnya dalam suatu masyarakat. Ketiga adalah pertanyaan mengenai solidaritas yang lebih menitik beratkan pada hubungan dan perbedaan sebagai dasar dalam pembentukan aksi sosial. Berdasarkan tiga konsep tersebut, maka identitas dapat disimpulkan sebagai suatu konsep diri yang terbentuk di lingkungan tempat dia berada yang dapat membedakan satu dengan lainnya (Anggraini, 2008).

Identitas diri ini merupakan aspek konsep diri yang paling mendasar. Setiap elemen dari identitas diri akan mempengaruhi cara individu mempersepsikan dunia fenomenalnya, mengobservasinya, dan menilai dirinya sendiri sebagaimana ia berfungsi. Pada kenyataannya, identitas diri berkaitan erat dengan diri sebagai pelaku. Identitas diri sangat mempengaruhi tingkah laku seorang individu, dan sebaliknya identitas diri juga dipengaruhi oleh diri sebagai pelaku (Anggraini,

2008)

Teori Etnisitas

Konflik etnis berakibat buruk terhadap kemajuan dan perkembangan bangsa dan negara. Anggota etnis yang berkonflik dalam suatu negara akan mengganggu keamanan dan ketenangan bagi anggota etnis tersebut bahkan bagi anggota etnis lain sehingga mereka tidak bisa bekerja secara nyaman dan tenang. Kondisi ini akan berakibat pada menurunnya produktifitas kerja mereka yang akan – sedikit banyaknya - berdampak pada menurunnya aktifitas kegiatan pasar. Konflik tersebut juga bisa menyebabkan kerugian materil secara langsung bagi anggota yang berkonflik. Energi pemerintah juga akan terserap banyak untuk memulihkan keadaan. Pengerahan berbagai aparat keamanan merupakan salah satu upaya yang biasanya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Berbagai upaya lain juga dilakukan dan kesemuanya itu akan berakibat pada kerugian finansial bagi pihak pemerintah. Konsentrasi pemerintah untuk mengembangkan pemerintahan akan terpecah yang kemungkinan sekali akan mengganggu kondisi politik pemerintahan yang salah satu faktor penyebabnya ialah kemungkinan para politisi akan terpolarisasi menjadi pihak yang pro dan kontra. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya-upaya preventif selain upaya kuratif. Upaya preventif pasti lebih murah dari pada upaya kuratif. Efektifitas dan efisiensi upaya yang akan ditempuh pemerintah untuk menangani masalah etnisitas ini sangat tergantung pada kualitas pengetahuan pemerintah terhadap masalah tersebut. Dengan pengetahuan yang komprehensif terhadap masalah-masalah etnisitas, pemerintah akan mampu merencanakan, merancang dan melaksanakan upaya untuk menangani hal tersebut.

Etnisitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan sejarah, nenek moyang, asal usul dan bahasa yang tercermin dalam simbol-simbol yang khas, seperti agama, pakaian dan tradisi. Secara singkat, etnisitas didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang secara budaya berbeda dari kelompok masyarakat yang lain. Suatu bangsa dan negara bisa jadi memiliki beragam etnis yang masing-masing memiliki ciri yang khas dan menonjol yang dengan mudah dapat dibedakan dari kelompok etnis yang lain (*International Encyclopedia of Social Science*, vol.3). Menurut Asmore (2001) kata etnis pada dasarnya merupakan katgori sosial atau identifikasi sosial. Artinya, etnis adalah konsep yang diciptakan oleh masyarakat berdasarkan ciri khas sosial yang dimiliki sekelompok masyarakat yang membedakannya dengan kelompok masyarakat yang lain. Jadi kategori pengelompokan masyarakat ke dalam suatu etnis tertentu didasarkan pada faktor sosial, bukan faktor yang lain, seperti faktor ekonomi, teknologi, dll.

Sebagai kelompok masyarakat yang berbeda dari kelompok yang lain, etnisitas memiliki keyakinan, bahasa, dan tujuan yang berbeda-beda namun harus bersatu

dalam suatu kesatuan berbangsa dan bernegara. Salah satu alat untuk menyatukannya dalam konteks kebangsaan, kenegaraan maupun dalam konteks interaksi antar etnis adalah bahasa. Namun demikian, bahasa bukan lah alat yang semata-mata karena bahasa itu sendiri dapat menyelesaikan masalah-masalah etnis yang timbul di tengah-tengah masyarakat karena bahasa adalah pengetahuan tentang kebahasaan itu sendiri, seperti pengetahuan tentang fonologi, morfologi, sintaks, semantiks dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Keterampilan merealisasikan pengetahuan ini dalam tindak berbahasa tidak dapat mengatasi masalah apa pun, termasuk masalah etnisitas. Keterampilan seperti ini hanya lah menunjukkan bahwa orang tersebut mampu mengespressikan dirinya dengan bahasa tersebut dan dapat dimengerti oleh mitra tuturnya. Dengan keterampilan seperti ini, seseorang disebut telah menguasai keterampilan berbahasa sebagai alat untuk mengungkapkan dirinya. Dalam posisi sebagai alat, keterampilan berbahasa masih memerlukan hal lain agar alat tersebut dapat untuk mencapai tujuan yang baik. Secara analogis, misalnya, pisau adalah alat yang dapat digunakan untuk hal yang baik dan untuk hal yang buruk. Jika digunakan kepada hal yang buruk, pisau itu sendiri tidak dapat dipersalahkan; yang dipersalahkan ialah penggunaannya. Faktor yang dimiliki seseorang di dalam dirinya yang mendorongnya untuk menggunakan pisau untuk hal yang buruk dan baik lah yang menentukan penggunaan pisau tersebut. Bahasa dalam posisi analogis yang sama, juga harus digunakan oleh penutur yang di dalam dirinya terdapat nilai atau *value* yang baik yang mendorongnya untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan berbahasa tersebut untuk tujuan yang baik dalam komunikasinya terhadap antar etnis amupun dalam komunikasinya terhadap pemerintah. Bertitik tolak kerangka pikir tersebut, makalah ini akan mengkaji hakekat etnisitas, hakekat potensi konflik dan faktor penyebab konlik, hakekat bahasa dalam kaitannya dengan komunikasi antar etnis serta peranannya dalam mengatasi masalah etnisitas.

Hakekat Etnisitas

Kata etnisitas berarti ciri-ciri yang dimiliki suatu kelompok masyarakat, terutama ciri-cirinya yang terkait dengan ciri-ciri sosiologis atau antropologis, misalnya ciri-ciri yang tercemin pada adat istiadat yang dilakoninya, agama yang dianutnya, bahasa yang digunakan, dan asal usul nenek moyangnya. Kelompok etnik ini dapat diidentifikasi dalam lingkungan budaya yang lebih luas melalui berbagai cara, seperti dari riwayat kehadirannya di tengah lingkungan budaya yang lebih luas, dari praktek keagamaan yang dilakukannya, diskriminasi yang diperolehnya dan dari kelompok masyarakat yang lebih besar. Selain itu, anggota kelompok etnik memiliki ciri fisik yang khas (Ramsey, 2003). Kata etnis sering dikacaukan dengan kata ras meskipun sudah jelas bahwa kata ras mengacu pada ciri-ciri

biologis dan genetik yang membedakan seseorang dari orang lain dalam suatu kelompok masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan ciri-ciri ini, ditemukan pada umumnya semua manusia dikelompokkan menjadi tiga jenis ras, yaitu ras Caucasoid, Negroid, dan mongoloid. Kekacauan ini terjadi karena, perbedaan yang sering terjadi pada kelompok-kelompok dalam suatu ras yang menyebabkan kelompok ini dipandang sebagai kelompok yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dan diperlakukan secara berbeda oleh anggota kelompok yang lebih besar dalam kelompok ras tersebut (Ramsey, 2003). Artinya, dalam suatu ras tertentu, bisa jadi terdapat beberapa kelompok yang lebih kecil yang dipandang sebagai etnis tersendiri. Oleh karena itu, etnis tidak lagi selalu dilihat dari sudut ras yang dimiliki suatu kelompok etnis. Menurut Ratcliffe (2006) kelompok etnis memiliki kesamaan asal usul dan nenek moyang, memiliki pengalaman atau pengetahuan masa lalu yang sama, mempunyai identitas kelompok yang sama, dan kesamaan tersebut tercermin dalam lima faktor, yaitu (1) kekerabatan, (2) agama, (3) bahasa, (4) lokasi pemukiman kelompok, dan (5) tampilan fisik.

Darity (2005) mendefinisikan bahwa etnik adalah kelompok yang berbeda dari kelompok yang lain dalam suatu masyarakat dilihat dari aspek budaya. Dengan kata lain, etnik adalah kelompok yang memiliki ciri-ciri budaya yang membedakannya dari kelompok yang lain. Ciri khas budaya yang membedakannya dari kelompok etnis yang lain terlihat dalam aspek: kekhasan sejarah, nenek moyang, bahasa dan simbol-simbol yang lain seperti: pakaian, agama, dan tradisi. Definisi di atas, pada dasarnya tidak berbeda, namun saling melengkapi. Artinya, definisi tersebut menguraikan konsep etnis dengan inti sari penjelasan yang sama, dan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada suatu definisi tidak bertentangan dengan definisi lain, melainkan menjadi saling melengkapi. Oleh karena itu, berdasarkan definisi di atas disarikan pengertian etnis sebagai berikut: Etnis adalah kelompok yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang khas yang membedakannya dari etnis yang lain. Eksistensi kelompok dan kekhasan kelompok disadari oleh setiap anggota etnis. Kekhasan budaya etnis tercermin dalam kolektifitas tindakan, kesamaan agama, kekhasan bahasa, pakaian dan tradisi. Oleh karena kekhasan ini, anggota kelompok memiliki identitas kelompok dan etnisitas ini juga ditandai dengan kesamaan lokasi pemukiman. Kekhasan ini pada dasarnya disebabkan oleh kesamaan atau kemiripan nenek moyang mereka dan asal usulnya dan oleh karenanya kekhasan kelompok juga ditandai oleh tampilan fisik yang khas dan pengalaman atau pengetahuan bersama terhadap masa lalu yang sama.

Banks (2005) menambahkan satu lagi ciri khas yang dimiliki suatu etnis, yaitu sifat psikologis yang khas. Artinya, selain aspek budaya, aspek psikologis suatu etnis bisa menjadi ciri pembeda suatu etnis dari etnis yang lainnya. Seiring dengan

uraian di atas, Asmore (2001) mengatakan bahwa etnisitas menyiratkan kekhasan budaya yang dimiliki suatu etnis yang membedakannya dengan etnis lain. Namun demikian, hubungan antara etnisitas dan kebudayaan sangat kompleks dan oleh karena itu, hubungan keduanya bukanlah hubungan satu lawan satu (one to one relationship) di mana satu kelompok yang memiliki budaya tertentu, otomatis menjadi satu kelompok etnis tertentu. Etnisitas, menurut Asmore (2001) adalah properti hubungan antara dua atau beberapa kelompok. Hubungan tersebut, antara lain, merupakan komunikasi sistematis yang berlangsung secara terus menerus untuk mengkomunikasikan perbedaan budaya oleh kelompok-kelompok yang mengkleim kelompoknya sebagai etnis-etnis yang berbeda. Oleh karena itu Asmore (2001) mengatakan bahwa etnisitas bersifat relational dan situasional di mana karakter etnis terlibat di dalamnya.

Potensi Konflik Etnis

Asmore (2001) mendefinisikan konflik sebagai ketidak sesuaian tujuan, keyakinan, sikap dan/atau tingkah laku. Artinya, berdasarkan keyakinan suatu etnis yang dibangun berdasarkan budaya etnisnya memiliki tujuan etnis secara umum dan tujuan tersebut dicapai dengan rancangan sikap atau tingkah laku anggota etnis. Tujuan ini menjadi citacita yang harus dicapai, namun dalam kenyataannya tujuan tersebut tidak tercapai oleh karena berbagai faktor, bahkan bisa jadi budaya yang diyakininya juga terancam juga karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Kesadaran semua anggotanya terhadap suatu kelompok etnis yang berlebihan dapat memicu munculnya faktor etnosentrisme (ethnocentrism) yang bisa jadi salah satu faktor pemicu konflik etnis. Etnosentrisme adalah sikap dasar yang menunjukkan keyakinan bahwa kelompok etnisnya merupakan etnis yang paling super dibandingkan dengan etnis lainnya. Etnis lainnya dipandang sebagai etnis yang lebih rendah dari etnisnya. Kebudayaan etnisnya dianggap sebagai kebudayaan yang paling utama atau paling sentral, yang lain adalah budaya pendukung, agamanya dipandang sebagai agama yang paling baik, tradisinya sebagai tradisi yang paling baik, pakaian adatnya dipandang sebagai yang paling baik, dll. Sikap seperti ini, mencerminkan keberpihakan yang berlebihan terhadap kelompok etnisnya yang dapat mengganggu kontak atau keguyuban antar etnik, bahkan dapat menimbulkan diskriminasi, buruksangka, kekerasan dan konflik antar etnis (Darity, 2005). Faktor-faktor yang dapat memicu konflik antar etnis dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu (1) paradigma kultural dan (2) paradigma struktural (Darity, 2005). Paradigma kultural memandang konflik etnis sebagai isu identitas sosial yang disebabkan oleh adanya ancaman terhadap budaya etnis. Ancaman ini bisa jadi dipicu oleh etnosentrisme sebagaimana diuraikan di atas, diskriminasi, buruk sangka, dll. Paradigma struktural memandang bahwa konflik etnis bukan merupakan isu identitas etnis, melainkan

isu yang erat kaitannya dengan masalah ekonomi, masalah politik, termasuk masalah pemukiman. Konflik antar etnis yang bersifat struktural dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) perebutan sumberdaya yang langka, seperti perebutan kekuasaan lapangan kerja, teritorial, ekonomi, pengakuan hak dalam artian yang luas, dll. (2) modernisasi yang bertentangan dengan budaya etnis, dan (3) penambahan anggota etnis melalui mekanisme non kekerabatan (non kinsip). Selain itu, terdapat faktor pemicu lain, seperti (1) kesamaan budaya suatu etnis yang mengabaikan kesetaraan sosial (overrides social equality), (2). terpicunya kepahitan dan ketidakadilan masa lalu yang dialami oleh suatu etnis, (3). terpicunya pengalaman pribadi yang buruk dari anggota suatu etnis, dan (4) pertentangan antara anggota pendatang lama dan pendatang baru, dan (5). Terjadinya penyederhanaan kompleksitas sosial menjadi pertentangan sederhana (Ratcliffe, 2006). Konflik etnis sebagaimana dipaparkan di atas, baik yang bersifat kultural maupun struktural terjadi karena pada dasarnya potensi konflik telah terdapat di dalam suatu etnis sebagai kelompok dan di dalam diri anggota-anggotanya sebagai individu. Potensi tersebut bersumber dari perbedaan budaya, tradisi, bahasa, kekerabatan, agama, pakaian adat, pengalaman masa lalu, kesamaan nenek moyang dan asal usul. Potensi ini dengan sangat mudah terpicu menjadi konflik jika perbedaan –perbedaan etnis tersebut diarahkan atau dikembangkan oleh pihak lain atau kelompok etnis lainnya menjadi tindakan-tindakan diskriminatif, tindakan buruk sangka, tindakan yang mengusik identitas etnis, dan tindakan yang mengganggu perolehan berbagai sumberdaya yang menjadi tujuan dari suatu etnis. Potensi konflik etnis cukup besar sebagai akibat dari perbedaan etnis yang sangat beragam. Oleh karena itu, tindakan pihak eksternal etnis, seperti pemerintah, etnis lain atau anggota etnis lain harus menyadari adanya perbedaan tersebut dan menghargainya sebagai penciri eksistensi kelompok etnis tersebut serta menjadikannya sebagai dasar penetapan tindakan yang nyaman bagi eksistensi kelompok etnis. Bahkan keputusan penentuan tindakan-tindakan anggota kelompok pun harus didasarkan pada tindakan yang menjadikan perbedaan etnis tersebut sebagai dasar. Tindakan yang dimaksud mencakup konsep yang luas, tidak terbatas pada tindakan non-verbal, melainkan meliputi tindakan verbal, seperti tindakan berkomunikasi.

Dari uraian tentang peranan bahasa sebagai alat komunikasi, sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penutur suatu bahasa harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang bahasa dengan segala aspek yang terkandung di dalamnya, pengetahuan substansi – segala hal yang akan dikomunikasikannya kepada mitra tuturnya, dan pengetahuan tentang mitra tuturnya – dengan siapa dia berkomunikasi. Artinya, seorang penutur suatu bahasa, agar dapat berkomunikasi dengan baik, salah satu di antaranya

ditentukan oleh kedalaman pengetahuannya terhadap ketiga aspek tersebut. Ketiga aspek ini, dalam konsep skills, dikelompokkan kedalam hard skills. Sebagai hard skills, pengetahuan tentang ketiga aspek tersebut merupakan resources (sumber) yang dapat dipilih dan diwujudkan dalam tindakan berkomunikasi. Penentuan pilihan resources dan cara mewujudkannya sepenuhnya tergantung pada seseorang. Yang mengendalikan seseorang untuk menetapkan tindak komunikasi dan cara mewujudkannya dalam suatu situasi komunikasi adalah nilai atau value orang tersebut. Kemampuan mewujudkan nilai atau value ke dalam wujud tindakan berkomunikasi disebut soft skills. Artinya, meski pun seseorang memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang keterampilan berkomunikasi dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam merealisasikan pengetahuan tersebut dalam tindak komunikasi (hard skills), jika tidak memiliki nilai atau value yang baik maka orang tersebut tidak akan memilih dan mewujudkan tindak komunikasi yang baik dan yang sesuai dengan situasi komunikasi yang dihadapinya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan saja tidak cukup untuk menjadikan seseorang baik dalam melakukan tindak komunikasi, tetapi orang tersebut juga harus memiliki soft skills yang dapat mewujudkan nilai atau *value* baik yang dimilikinya wujudkannya dalam wujud tindak berkomunikasi yang baik. Dengan menganalisis konflik etnis dari perspektif bahasa, Chriost (2003) mengatakan bahwa pada hakekatnya bahasa merupakan hubungan yang rumit antara identifikasi diri (masing-masing anggota kelompok), kekohesifan kelompok (etnis) dan pandangan dunia (*world view*) yang dimiliki kelompok. Hubungan ketiga konsep ini terlihat dari bukti-bukti bahwa ternyata seseorang ketika sedang berbicara tidak hanya mengungkapkan tentang isi atau materi pembicaraan (*the world out there*), tetapi juga menunjukkan jati diri realitas sosialnya. Agar hubungan ketiga konsep ini terealisasikan, pemerolehan bahasa tidak semata-mata dilakukan untuk memperoleh bahasa itu sendiri (*Linguistic Code*), tetapi sekaligus untuk memperoleh status dan peranan sosial dalam kelompok etnisnya, kesadaran terhadap efek sosial dari status tersebut dan pandangan tentang dunianya (*his world view*). Jadi dengan pemahaman seperti ini, di yakini bahwa bahasa merupakan cerminan identitas budaya etnis dan alat pemroduksian kembali perbedaan sosial antar etnis. Bahasa dapat dimanipulasi oleh penutur dan petutur untuk mewujudkan beragam fungsi (Chriost, 2003). Misalnya, seseorang yang sedang berkomunikasi dengan orang lain, orang tersebut tidak sekedar berusaha untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya sebaik mungkin agar mitra bicaranya dapat memahaminya sebagai mana yang dinginkannya untuk dipahami oleh mitra bicaranya, tetapi juga dia dan mitra bicaranya secara bersama-sama menegaskan hubungan mereka, menunjukkan identitas diri masingmasing sebagai anggota kelompok sosial tertentu, dan menentukan pilihan

peristiwa komunikasi yang mereka pakai. Frasa dapat dimanipulasi pada pernyataan Chriost (2003) tersebut menyiratkan makna bahwa bahasa adalah alat di tangan mereka yang dapat dimanipulasi untuk mewujudkan beragam fungsi yang mereka inginkan. Selain itu, frasa tersebut juga meniratkan bahwa yang menentukan pilihan fungsi yang akan diwujudkan melalui pemanipulasian bahasa adalah penutur dan petutur yang menggunakan bahasa tersebut. Berkenaan dengan kedua makna tersirat ini, yang menjadi pertanyaan ialah: apa yang mendorong atau apa yang menyebabkan penutur atau petutur memutuskan untuk memilih fungsi bahasa tertentu – bukan fungsi lain – untuk diwujudkan melalui pemanipulasian bahasa? Kekuatan yang mendorong atau yang menentukan pilihan fungsi ini ialah etnisitas yang dimiliki oleh suatu kelompok etnis tertentu.

Konsep etnisitas dapat dikaji dari dua sisi (Chriost, 2003). Yang pertama – menurut pandangan primordialis – adalah identitas individu sebagai anggota kelompok etnis dan identitas kelompoknya yang berakar dari budayanya dan diwariskan oleh nenek moyangnya kepadanya. Identitas ini diperoleh sejak dia lahir dan dipegangnya hingga dia meninggal. Pandangan ini mengkleim bahwa etnisitas adalah identitas intrinsik etnis yang bersifat primordial dan statis. Yang kedua – menurut pandangan instrumentalis – adalah identitas kelompok etnis yang lahir dari kepentingan untuk menciptakan kaplingan pembatas antara kelompok etnisnya dengan kelompok etnis yang lain. Artinya, identitas tersebut diciptakan untuk menunjukkan bahwa kelompok etnisnya. Dalam konsep seperti ini, etnisitas dipahami sebagai sumberdaya atau alat yang dimiliki suatu kelompok etnis untuk memobilisasi dalam rangka memenuhi barang dan jasa ekonomis maupun sosial. Dalam pemahaman yang paling ekstrim dari pandangan ini ialah bahwa seseorang dapat menglain identitas etnik tertentu dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam suatu lingkungan tertentu. Dengan demikian – menurut pandangan ini – etnisitas ini tidak lah bersifat statis; melainkan bersifat dinamis. Kedua konsep ini bisa jadi merupakan dua sisi dari satu mata uang. Keduanya bisa jadi sama-sama benar tergantung dari perspektif mana pandangan diarahkan. Jika identitas – baik berdasarkan premordial maupun instrumentalis - merupakan faktor penentu pilihan fungsi bahasa, maka potensi konflik diperkirakan muncul dari keinginan suatu kelompok etnis yang berlebihan untuk mendapat pengakuan dari kelompok etnis yang lain, dan/atau persepsi suatu kelompok yang terlalu tinggi menilai kelompoknya sendiri sehingga memperlakukan kelompok etnis lain lebih rendah dari kelompok etnisnya. Potensi konflik ini lebih bersumber dari faktor intrinsik. Sumber potensi konflik yang kedua ialah kompetisi bahkan perebutan sumber daya ekonomi atau sumberdaya sosial antar kelompok. Potensi konflik ini bersumber dari faktor ekstrinsik, yakni faktor kebutuhan kelompok etnis terhadap barang dan jasa ekonomis maupun sosial.

Kedua faktor pendorong konflik etnis tersebut akan terwujud dalam perilaku atau tindak bahasa Etnisitas, sebagai mana disebut oleh Asmore (2001), adalah entitas hubungan antara dua kelompok etnis atau antara beberapa kelompok etnis. Hubungan tersebut merupakan komunikasi sistematis untuk mengkomunikasikan perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok etnis. Komunikasi ini bersifat relasional dan situasional di mana karakter etnis terlibat di dalamnya. Karakter etnis dalam uraian ini – jika dibandingkan dengan konsep nilai, value atau soft skill pada uraian di atas- dapat dikatakan bahwa terdapat kesamaan di antara kedua jenis istilah ini. Dengan pengertian seperti itu, dapat pula dikatakan bahwa dalam komunikasi antar etnis, karakter etnis sangat menentukan warna tindak komunikasi yang akan diwujudkan. Artinya, meskipun pengetahuan tentang komunikasi yang baik sangat dikuasai tetapi jika karakter etnis tidak baik, tetap saja tindak komunikasi yang dilakukan tidak baik juga. Bahasa adalah tindakan verbal yang digunakan untuk mengekspresikan sikap, pandangan dan nilai yang dimiliki oleh seseorang. Etnosentris, misalnya, merupakan pandangan berlebihan terhadap kelompok etnis seseorang dan pandangan ini akan diekspresikan melalui penggunaan bahasa oleh anggota etnis tertentu kepada anggota etnis lain dalam suatu situasi komunikasi yang dapat menimbulkan reaksi negatif dari mitra tuturnya. Jika kondisi komunikasi seperti ini berlangsung terus menerus, maka hal tersebut akan mengubah potensi konflik menjadi konflik benaran. Buruk sangka (prejudice) yang dimiliki seseorang dari kelompok etnis tertentu terhadap etnis lainnya juga akan diekspresikan dalam wujud tindak komunikasi yang akan didengar dan disikapi secara negatif oleh anggota kelompok etnis lain. Jika hal tersebut terjadi secara terus menerus, maka cakupan anggota kelompok yang bereaksi negatif akan semakin banyak yang pada akhirnya juga akan dapat mengubah potensi konflik menjadi konflik benaran.

Kandungan nilai, sikap, dan pandangan yang negatif dari suatu etnis tertentu terhadap etnis lainnya akan menimbulkan hal yang negatif atau atau tidak bagi etnis yang lain tergantung pada gaya komunikasi atau strategi komunikasi yang digunakan oleh etnis tersebut dalam mengekspresikan nilai, sikap dan pandangan tersebut. Penggunaan gaya bahasa atau strategi komunikasi yang baik dalam mengekspresikan nilai, sikap dan pandangan negatif terhadap etnis lain akan mampu mengurangi eksresi negatif atau reaksi negatif dari etnis lain yang menerima ekspresi tersebut. Peluang melakukan pilihan gaya bahasa atau strategi komunikasi, seperti pilihan melakukan eufemisme, atau pilihan piranti bahasa yang lain tersedia bagi setiap etnis. Peluang melakukan pilihan ini tergantung pada seberapa banyak pilihan gaya atau strategi komunikasi yang dikuasai. Artinya, syarat pertama bagi kekeluasaan melakukan pilihan adalah tingkat penguasaan suatu bahasa sebagai alat komunikasi. Karena bahasa

dengan segala pirantinya, seperti gaya bahasa, strategi komunikasi, dll. adalah alat dalam berkomunikasi, maka sebagai alat yang akan dipilih, faktor yang mendorong ke mana jatuhnya pilihan yang akan dilakukan menjadi syarat yang kedua. Faktor yang mendorong tersebut berasal dari nilai yang dimiliki oleh suatu etnis dalam menyikapi keberadaan etnis lain dan dalam menyikapi bentuk hubungan antar etnis. Toleransi antar etnis, dalam artian bahwa betapa pun terdapat perbedaan yang mencolok antar etnis jika dibarengi dengan sikap dan pandangan bahwa etnis lain tersebut juga merupakan bagian dari dirinya dalam konteks berbangsa dan bernegara yang harus saling bahu membahu dalam membangun bangsa dan negara tersebut, maka perbedaan tersebut akan dapat diterima dan akan mampu melihat perbedaan sebagai kekuatan dalam membangun sinerjitas. Nilai inilah yang menjadi faktor utama yang mengendalikan pilihan strategi dan gaya komunikasi yang eufemistik, reduktif atau mitigatif. Penguasaan Bahasa sebagai alat komunikasi adalah faktor kedua.

Potensi konflik antar etnis bisa jadi tumbuh dari suatu keadaan di mana setiap anggota suatu etnis memiliki sikap hubungan antar anggota atau kesatuan yang sangat berlebihan yang dikenal dengan sebutan etnosentris. Etnosentris di satu sisi akan semakin mempererat hubungan antar anggota, karena etnosentris akan mendorong perilaku diskriminatif dan perilaku-perilaku lain yang menunjukkan keberpihakan berlebihan terhadap anggotanya yang menimbulkan perasaan terpinggirkan bagi anggota etnis lain. Oleh karena itu, etnosentris di sisi lain, akan menimbulkan kerenggangan dengan etnis lain. Sumber potensi konflik yang lain bisa jadi sikap prejudice (buruk sangka) yang dimiliki suatu etnis terhadap etnis lainnya. Perilaku yang bersifat etnosentris atau/dan prejudice dan perilaku negatif lainnya adalah perilaku yang teramati yang wujud dalam bentuk tindakan yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan oleh etnis lain. Tindakan yang dapat dilihat, misalnya, adalah tindakan diskriminatif, yaitu tindakan yang tidak adil dan tidak objektif. Sedangkan tindakan yang dapat didengar, misalnya, adalah tindakan verbal yang wujud dalam bentuk tindak komunikatif. Kedua jenis tindakan ini, pada dasarnya, adalah cerminan atau didorong oleh nilai (*value*), sikap dan pandangan yang dimiliki oleh anggota etnis lain. Penguasaan bahasa sebagai alat komunikasi dalam konteks etnisitas merupakan alat yang siap dipilih dan digunakan oleh anggota suatu etnis untuk mengekspresikan nilai, sikap dan pandangan yang dimilikinya terhadap anggota etnis lain. Oleh karena itu pembinaan dan peningkatan penguasaan bahasa sebagai alat komunikasi dalam arti seluas-luasnya hanya lah merupakan upaya parsial dalam upaya mencegah potensi konflik berubah menjadi konflik beneran. Upaya parsial ini tidak akan pernah berhasil tanpa penanganan yang baik terhadap nilai, sikap dan pandangan anggota suatu etnis terhadap etnis lainnya. Jadi hubungan antara bahasa dengan

etnisitas, dan konflik antar etnis adalah bersifat supportif dan fasilitatif. Artinya, penumbuhan nilai, sikap dan pandangan yang positif dan toleran dari suatu etnis dalam konteks etnisitas akan terfasilitasi dan terealisasi oleh bahasa melalui penggunaannya dalam tindak komunikatif yang baik.

Etnisitas merupakan kategori-kategori yang diterapkan pada kelompok atau kumpulan orang yang dibentuk dan membentuk kolektivitas. Jadi, etnisitas lebih mengacu kepada kolektivitas daripada mengacu pada individu. Ikatan ikatan etnis terwujud dalam kumpulan orang, kelengkapan-kelengkapan primordial seperti derajat, martabat, bahasa, adat-istiadat atau kepercayaan. Kelengkapan kelengkapan primordial tersebut dibebankan kepada setiap anggota yang dilahirkan dalam kelompok tersebut dan menjadikannya serupa dengan kelompok-kelompok lain. Dalam suatu etnis, ada karakteristik yang selalu melekat. Karakteristik tersebut adalah tumbuhnya perasaan berada dalam satu komunitas (sense of community) dan “kekitaan” di antara para anggotanya. Karena karakteristik tersebut maka muncullah rasa kekerabatan.

Munculnya, ikatan primordial dalam kehidupan politik disebabkan masyarakat masih terlalu awam dalam politik dan sedang mengalami proses perubahan sosial melalui modernisasi dalam tradisi politik pemerintahan walaupun masih lemah dan persyaratan teknis bagi suatu pemerintahan yang efektif masih kurang dipahami. Dalam politik praktis eksistensi faktor-faktor emosional dan sentimen psikologis yang biasanya terkait dengan faktor primordial dan SARA adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan dalam setiap kampanye.

Mengutip pendapat Abdullah A. Harahap di atas, tentunya primordialisme menurutnya pada saat ini sudah menjadi komoditas politik yang mengarahkan pada bagaimana output dari kualitas pemimpin yang dihasilkan. Dengan mengukur, Apakah kandidat yang berkompetisi dalam Pilkada dimenangkan oleh pewacanaan primordialisme sebagai instrumen yang mengarahkan masyarakat dalam melakukan pilihan politiknya, ataukah kandidat dimenangkan oleh ketertarikan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh kandidat pada saat Pilkada berlangsung.

Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya majemuk pada awalnya memungkinkan terjadinya pengelompokan-pengelompokan masyarakat berdasarkan ikatan primordial, seperti yang diungkapkan Prof. Dr. Awan Mutakin (2004:272), pengelompokan tersebut terdiri dari:

1. Ikatan kekerabatan berdasarkan hubungan darah (genealogis) atau keturunan. Dalam kelompok masyarakat akan memperhatikan kelompok kerabatnya dalam setiap organisasi masyarakat
2. Ikatan Ras atau kesukuan. Ras sebagai ciri fisik seseorang atau masyarakat. Seperti warna kulit, tipe muka, bentuk rambut dan lain-lain, akan berbeda dengan

orang lain yang memiliki latar belakang ras yang berbeda pula.

3. Bahasa. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa oleh orang-orang yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Walaupun berada diantara orang-orang yang berbeda latar belakang daerah dan bahasanya. Kadangkala yang berasal dari suatu daerah akan memiliki logat berbicara sebagai ciri kedaerahannya, begitu pula dalam hal bergaul, berbicara, atau berpidato yang menggunakan bahasa nasional akan turut struktur bahasa daerahnya atau beberapa kata bahasa daerah turut (tersisipi) dalam pembicaraannya.

4. Agama. Masyarakat yang majemuk dalam hal keagamaan akan mementingkan orang-orang yang seagama dalam menempati kedudukan disuatu lembaga, walaupun hal ini tidak mutlak, tetapi dalam menempatkan pimpinan lembaga bersangkutan akan lebih baik apabila memiliki agama yang sama. Masyarakat Indonesia yang majemuk memungkinkan terus bertahannya ikatan ikatan primordial, yang mengarah pada pembentukan kelompok-kelompok politik dan ekonomi.

Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118). Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan

dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut Emile Durkheim (dalam Djuretna Imam Muhni, 1994: 29-31) keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama.

Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Soerjono Soekanto, 2006: 22). Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Banyak deskripsi yang dituliskan oleh para pakar mengenai pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata Latin socius, berarti "kawan". Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti "ikut serta, berpartisipasi". Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi" (Koentjaraningrat, 2009: 116). Menurut Phil Astrid S. Susanto (1999: 6), masyarakat atau society merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang, sedangkan menurut Dannerius Sinaga (1988: 143), masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas

karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan.

Adapun macam-macam masyarakat yaitu:

a. Masyarakat modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat-istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru (Dannerius Sinaga, 1988: 156). Berdasar pada pandangan hukum, Amiruddin (2010: 205), menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern mempunyai solidaritas sosial organis. Menurut OK. Chairuddin (1993: 116), solidaritas organis didasarkan atas spesialisasi. Solidaritas ini muncul karena rasa saling ketergantungan secara fungsional antara yang satu dengan yang lain dalam satu kelompok masyarakat. Spesialisasi dan perbedaan fungsional yang seperti diungkapkan tersebut memang kerap dijumpai pada masyarakat modern.

Selain adanya solidaritas organis, Amiruddin (2010: 206) juga menjelaskan bahwa hukum yang terdapat dalam masyarakat modern merupakan hukum restruktif yaitu hukum berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan untuk membentuk kembali hubungan yang sukar atau kacau kearah atau menjadi normal. Jadi masyarakat modern merupakan yang sudah tidak terikat pada adat-istiadat dan cenderung mempunyai solidaritas organis karena mereka saling membutuhkan serta hukum yang ada bersifat restruktif.

b. Masyarakat tradisional Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun-temurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis (Dannerius Sinaga, 1988: 152). Menurut Rentelu, Pollis dan Shcaw yang dikutip dalam (P. J Bouman. 1980: 53) masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang statis tidak ada perubahan dan dinamika yang timbul dalam kehidupan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang melangsungkan kehidupannya berdasar pada patokan kebiasaan adat-istiadat yang ada di dalam lingkungannya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya, sehingga kehidupan masyarakat tradisional cenderung statis.

Menurut P. J Bouman (1980: 54-58) hal yang membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat

terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam. Oleh karena itu masyarakat tradisional mempunyai karakteristik tertentu yang menjadi ciri pembeda dari masyarakat modern. Adapun karakteristik pada masyarakat tradisional diantaranya:

1. Orientasi terhadap nilai kepercayaan kebiasaan dan hukum alam tercermin dalam pola berpikirnya
2. Kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor agraris
3. Fasilitas pendidikan dan tingkat pendidikan rendah
4. Cenderung tergolong dalam masyarakat agraris dan pada kehidupannya tergantung pada alam sekitar
5. Ikatan kekeluargaan dan solidaritas masih kuat
6. Pola hubungan sosial berdasar kekeluargaan, akrab dan saling mengenal
7. Kepadatan penduduk rata-rata per kilometer masih kecil
8. Pemimpin cenderung ditentukan oleh kualitas pribadi individu dan faktor keturunan (Dannerius Sinaga, 1988: 156). Berbeda dengan karakteristik yang diungkapkan oleh Dannerius sinaga, Selo Soemardjan (1993: 62-68) mencirikan masyarakat tradisional berdasarkan pandangan sosiologis. Berikut karakteristiknya:

- a. Masyarakat yang cenderung homogen
- b. Adanya rasa kekeluargaan, kesetiakawanan dan rasa percaya yang kuat antar para warga
- c. Sistem sosial yang masih diwarnai dengan kesadaran kepentingan kolektif
- d. Pranata adat yang efektif untuk menghidupkan disiplin sosial
- e. Shame culture (budaya malu) sebagai pengawas sosial langsung dari lingkungan sosial manusia, rasa malu mengganggu jiwa jika ada orang lain yang mengetahui penyimpangan sistem nilai dalam adat-istiadat.

Ciri-ciri masyarakat tradisional berdasarkan pandangan sosial berbeda dengan ciri masyarakat berdasarkan pandangan hukum. Karakteristik masyarakat tradisional berdasarkan hukum dapat dilihat pada pendapat yang dikemukakan oleh Amiruddin (2010: 205), bahwa masyarakat tradisional cenderung mempunyai solidaritas sosial mekanis. Solidaritas mekanis merupakan solidaritas yang muncul atas kesamaan (keserupaan), konsensus dan dapatnya saling dipertukarkan antara individu yang satu dengan individu yang lain berada dalam kelompok itu. Tidak ada kekhususan pada masing-masing individu (OK. Chairuddin, 1993: 115).

Berbeda dengan pendapat Selo Soemardjan (1993: 186) disiplin hukum masyarakat tradisional terhadap hukum negara lemah. Akan tetapi disiplin terhadap hukum adat cukup kuat. Sosial control dan disiplin hukum adat akan digunakan oleh masyarakat untuk mengatur ketertiban tata hidup

sosialnya. Dari penjelasan tersebut, dapat dimaknai keseragaman masyarakat sering di jumpai pada masyarakat tradisional lebih patuh terhadap hukum adat daripada negara atau hukum nasional. Dalam masyarakat tradisional hukum yang ada bersifat represif. Hukum dengan sanksi represif memperoleh pernyataan hukumnya yang utama dalam kejahatan dan hukuman. Pelanggaran peraturan-peraturan sosial berarti kejahatan dan menimbulkan hukuman (Amiruddin, 2010: 204).

Multikultural

Multikultural secara etimologi berasal dari kata multi yang berarti banyak, dan kultur yang berarti kebudayaan. Jadi multikultural adalah beragam kebudayaan. 1 Kultur atau kebudayaan itu sendiri tidak lepas dari empat hal yaitu aliran agama, ras, suku, dan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi multikultural tidak hanya terkait dengan perbedaan budaya tetapi juga keberagaman agama, ras dan etnis. Dalam bukunya M. Ainul Yaqin, dijelaskan beberapa definisi kultur dari beberapa ilmuwan, yaitu antara lain:

- a. Elizabeth B.Taylor (1832-1917) dan LH. Morgan (1872-1917) menjelaskan bahwa kultur adalah sebuah budaya yang bersifat universal terhadap manusia dalam berbagai macam tingkatan yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat.
 - c. Emile Durkheim (1858-1917) dan Marcel Maus (1872-1950) menjelaskan bahwa kultur adalah sekelompok masyarakat yang menganut sekumpulan simbol-simbol yang mengikat didalam sebuah masyarakat untuk diterapkan
 - d. Ruth Benedict (1887-1942) dan Margareth Mead (1901-1987) menjelaskan kultur adalah kepribadian yang ditulis dengan luas, bentukbentuk dan sekaligus terbentuknya kepribadian tersebut ditentukan oleh kepribadian anggotanya.
 - d. Mery Douglas (1921) dan Cliffort Geertz (1926-2006) berpendapat bahwa kultur adalah sebuah cara yang dipakai oleh semua anggota dalam sebuah kelompok masyarakat untuk memahami siap diri mereka untuk memberi arti pada kehidupan mereka.
- 2 Menurut Abdullah, multikulturalisme merupakan pemahaman yang menekankan pada disparitas dan persamaan budaya lokal tanpa mengabaikan hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan multikulturalisme terletak pada kesetaraan budaya.
- 3 Berkaitan dengan konteks tersebut, terdapat makna pengakuan dan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya berdampingan dengan kehidupan uniknya..
- 4 Dalam kehidupan multikultural suatu bangsa, masyarakat dituntut untuk menerima keberagaman budaya sebagai realitas dan kehidupan. Dengan demikian akan terwujud dan

membuat seseorang terbuka untuk menjalani kehidupan bersama dan kehidupan pribadinya yang lebih baik. Secara sederhana, multikulturalisme adalah pemahaman yang membenarkan dan meyakini relativisme budaya yang disebabkan oleh keragaman budaya, keragaman etnis dengan ciri-cirinya. Sehingga dasar munculnya multikulturalisme bermuara pada kajian dan kebudayaan. Dari doktrin ini diharapkan akan muncul antusiasme dan rasa hormat terhadap perbedaan budaya dan akan muncul toleransi lebih lanjut dalam hidup berdampingan dengan keberagaman. Multikulturalisme adalah isu mutakhir yang akan terus menambah diberbagai dinamika kehidupan. Multikulturalisme tidak akan pernah mengalami ujung pengkajian dalam ranah akademik yang memadai. Dunia akademik sangatlah diperlukan untuk menyajikan materi pembelajaran berbasis multikultural (Multicultural Based Education) dan kajian ini diperlukan untuk membentuk kesadaran multikulturalisme di tengah budaya.⁵ Hal ini berimplikasi positif terhadap interaksi antar manusia yang bekerja sama dan saling mempengaruhi. Kualitas manusia akan menjadi ukuran kualitas kedewasaan dalam menghadapi tantangan dunia pertukaran informasi tentang nilai, budaya, pengetahuan, dan bahasa. Identitas bangsa membutuhkan penyangga ideologis yang kokoh agar tidak meresap ke dalam ciri khas Indonesia. Makna multikulturalisme menegaskan bahwa semua perbedaan pasti sangat diakui. Multikulturalisme diposisikan sebagai respons terhadap keberagaman. Dengan kata lain, keberadaan komunitas yang berbeda tidaklah cukup, karena yang terpenting komunitas itu dibutuhkan oleh masyarakat dan negara. Jika menilik masa lalu, wacana multikulturalisme dalam konteks Indonesia mulai terbentuk plotnya ketika Mukti Ali merumuskan program utamanya yaitu program pembinaan kerukunan umat beragama yang terjadi di Indonesia yang dikembangkan dalam bentuk trilogi kerukunan, yaitu kerukunan internal beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan. antara komunitas agama dan pemerintah. Keberhasilan Mukti Ali dalam menjalankan programnya ditunjannoleh latar belakangnya sebagai ahli Ilmu Perbandingan Agama yang sangat diakui di Indonesia.

Nilai Multikultural

Nilai adalah prinsip, tujuan, atau standar sosial yang digunakan atau diterima oleh individu, kelas, atau masyarakat. Nilai juga memiliki keterkaitan dengan kebaikan, walaupun keduanya tidak sama mengingat kebaikan tidak selalu bernilai tinggi bagi seseorang atau sebaliknya.¹⁶ Nilai bervariasi dalam bentuk yang tidak dapat dikaitkan satu sama lain. Namun demikian, keterkaitan antara proses penilaian tersebut juga akan

terlihat dalam suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh manusia. Nilai adalah sesuatu yang abstrak, ideal, nilai bukanlah objek yang konkret, bukan fakta, dan bukan hanya tentang benar atau salah dan membutuhkan bukti empiris, tetapi tentang masalah penghargaan yang diinginkan, disukai, dan tidak disukai.¹⁷ Nilai selalu menjadi sebuah persoalan manusia dalam menjalani kehidupan. Setiap kali ingin melakukan pekerjaan, perlu untuk membuat pilihan diantara banyak kemungkinan. Nilai menjadi sebuah ukuran untuk memilih tindakan atau tujuan tertentu. Nilai tidak terletak pada barang ataupun sebuah peristiwa, tetapi manusia memasukkan nilai kedalamnya sehingga suatu peristiwa itu mengandung nilai, oleh karena itu, subjeklah yang tahu.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah harapan tentang sesuatu yang mempunyai manfaat, selalu dijunjung tinggi dan sebagai sebuah acuan perilaku bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural berupa demokratis, humanisme, pluralisme. Adapun dalam pendidikan multikultural, proses nilai yang ditanamkan berupa cara hidup menghormati, tulus, toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural. Terdapat beberapa nilai yang harus diperhatikan dalam pendidikan multikultural, yaitu:

a. Nilai toleransi

Yaitu sikap menghormati, menerima pilihan, pandangan, keyakinan, kebiasaan, dan pendapat orang lain yang berbeda dengan dirinya.

b. Nilai kesamaan/ kesetaraan Yaitu

Mengakui adanya persamaan, persamaan hak, dan kewajiban yang sama sebagai sesama manusia. Dalam proses pendidikan, pendidik harus beranggapan bahwa semua siswa adalah sama, tidak mengkhususkan atau membedakan antara siswa yang satu dengan siswa lainnya.

c. Nilai Persatuan Yaitu

membentuk pemahaman, pikiran, dan sikap yang mengutamakan keutuhan dan kedaulatan, kebersamaan dan kerjasama.

d. Nilai Kekerabatan atau Persaudaraan Yaitu

sikap ramah, kekeluargaan lahir dari rasa persaudaraan dan menjadi bagian dari kelompok dan masyarakat itu sendiri. Dengan rasa kekeluargaan ini akan muncul rasa solidaritas, rasa persaudaraan dengan berbagai suku, suku, kelompok dan agama, serta pemahaman akan makna perbedaan.

e. Nilai keadilan

Yaitu memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan porsinya masing-masing. Sehingga terdapat keseimbangan dan harmoni antara menuntut hak dan melaksanakan kewajiban, mengakui potensi yang sama dalam berekspresi, dan mengakui persamaan kesempatan dalam pelayanan publik.

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara epistemologi multikultural dibentuk dari kata “multi” (banyak) dan “kultural” (budaya), “isme” (aliran/paham). Secara hakiki dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik (Mahfud, 2009: 75). Azyumardi Azra mengatakan bahwa multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas dan realitas multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang mengakui eksistensi kultural yang ada, terlepas dari besar atau kecilnya; pandangan inilah yang kemudian disebut sebagai *politics of recognition* (Azra 2007: 13).

Bhikhu Parekh mengatakan multikulturalisme tidak seperti perbedaan yang muncul dari pilihan individu, perbedaan yang diperoleh secara kultural membawa satu tolak ukur otoritas dan diberi bentuk serta distrukturkan karena dilekatkan dalam satu sistem arti dan makna yang diwariskan dan dimiliki secara historis (Parekh, 2008:15). Multikulturalisme, dengan demikian mengenai keanekaragaman atau perbedaan yang dilekatkan secara kultural. Berdasarkan pengertian tentang multikulturalisme dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan secara singkat bahwa yang dimaksud dengan multikulturalisme adalah sebuah keadaan dimana masyarakat yang terdiri dari beragam perbedaan dapat hidup berdampingan dan memiliki rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Dengan pengertian yang beragam dan kecenderungan perkembangan konsep dan praktek multikulturalisme, Parekh (1997: 183-185) membedakan lima macam multikulturalisme. Pembagian kelima bentuk multikulturalisme ini tidak kedap air (*watertight*), sebaliknya bias tumpang tindih dalam segi-segi tertentu : Pertama, “multikulturalisme isolasionis” yang mengacu kepada masyarakat dimana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Contoh-contoh kelompok ini adalah seperti masyarakat yang

ada pada sistem “millet” di Turki Usmani atau masyarakat Amish di Amerika Serikat. Kelompok masyarakat Samin di Indonesia juga menganut sistem multikulturalisme isolasionis. Kelompok masyarakat ini menerima keberagaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan, budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya. Kedua, “Multikulturalisme akomodatif”, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka; sebaliknya kaum minoritas tidak menantang kaum kultur dominan. Multikulturalisme akomodatif ini dapat ditemukan di Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lainnya. Ketiga multikulturalisme otonomis, yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bias diterima. Concern pokok kelompok-kelompok kultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat dimana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. Jenis multikulturalisme ini didukung misalnya oleh kelompok Quebecois di Kanada dan kelompok-kelompok muslim imigran di Eropa, yang menuntut untuk bias menerapkan syari’ah, mendidik anak-anak mereka pada sekolah islam, dan sebagainya.

Keempat, “multikulturalisme kritikal” atau “interaktif”, yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom; tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok budaya dominan tentu saja cenderung menolak tuntutan ini, dan bahkan berusaha secara paksa untuk menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok minoritas. Karena itulah kelompok minoritas menantang kelompok kultur dominan, baik secara intelektual maupun politis. Dengan tujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi penciptaan secara bersama-sama sebuah kultur kolektif baru yang egaliter secara genuine. Jenis multikulturalisme ini, sebagai contoh, diperjuangkan

masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain. Kelima, “Multikulturalisme kosmopolitan”, yakni berusaha menghapus batasbatas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat dan committed kepada budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing . para pendukung multikulturalisme jenis ini sebagian besar adalah intelektual diasporik dan kelompok-kelompok liberal yang memiliki kecenderungan postmodernist dimana memandang seluruh budaya sebagai resources yang dapat mereka pilih dan ambil secara bebas.

Menurut Azyumardi Azra, Indonesia kelihatannya termasuk ke dalam multikulturalisme kedua dan keempat. Di Indonesia, pada dasarnya terdapat kultur dominan baik dalam konteks budaya, politik, etnis dan agama; tetapi pada dasarnya kultur dominan memberikan akomodasi bagi kultur lain untuk mengekspresikan dirinya. Juga terjadi proses interaksi yang cukup intens antara kultur dominan dengan kultur - kultur lain, yang pada gilirannya memunculkan sebuah “supra kultur” yang sederhanya dapat dinisbahkan kepada kultur Indonesia-kultur nation-state Indonesia (Azra 2007:16).

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, sehingga bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang sangat kaya akan kebudayaan. Keragaman budaya, bahasa, suku, ras dan agama yang dimiliki oleh bangsa ini bisa diamati dari wilayah Sabang sampai Merauke dan bisa diamati melalui produk-produk budaya yang dihasilkan oleh setiap suku bangsa di Indonesia. Masyarakat Indonesia juga bisa dikatakan sebagai masyarakat yang pluralistik yang berasal dari kata “pluralisme ” (Soekanto, 1984 : 48). Sebenarnya istilah ini pada awalnya lebih digunakan untuk menggambarkan suatu sistem politik tertentu, yang diperlukan didalam negara yang kompleks untuk menerapkan demokrasi, sebab dalam sistem demokrasi selalu ditandai dengan pembagian kekuasaan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang efektif antara golongan-golongan tertentu dalam masyarakat , dengan maksud mengadakan kompetisi yang sehat. Namun seiring berjalannya waktu, istilah tersebut dipergunakan dan diterapkan pada masyarakat – masyarakat yang mencakup aneka ragam suku bangsa. Dan keaneka ragam suku bangsa inilah yang disebut sebagai kelompok/ komunitas etnis (ethnic-group) yang masingmasing mempunyai kebudayaan khusus (sub-culture).

Suku bangsa itu sendiri merupakan kesatuan-kesatuan manusia yang sangat terikat oleh kesadaran dan kesatuan sistem sosial dan kebudayaan (yang selalu didukung oleh bahasa dan pola komunikasi tertentu dalam komunitas–komunitas etnis dan suku bangsa tersebut). J. Jones (dalam Liliweri 2007) mendefinisikan etnis atau sering disebut Kelompok/ Komunitas etnis adalah sebuah himpunan manusia (sub kelompok manusia) yang dipersatukan oleh suatu kesadaran atas kesamaan sebuah kultur atau subkultur tertentu, atau karena kesamaan ras, agama, asal usul bangsa, bahkan peran dan fungsi tertentu. Trewatha (Winardi, 2004: 53) mendefinisikan bahwa sebuah organisasi dapat dinyatakan sebagai sebuah struktur sosial yang didesain guna mengkoordinasi kegiatan dua orang atau lebih, melalui suatu pembagian kerja dan hirarki otoritas guna melaksanakan pencapaian tujuan umum tertentu. Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi etnis adalah kelompok ataupun komunitas yang berlatar belakang etnis dan ras yang sama yang diwadahi oleh sebuah badan yang dikoordinir oleh struktur untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.

Pengertian pergaulan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perihal bergaul, pencampuran dalam persahabatan (Depdiknas, 2002 : 339). Selanjutnya Ghosally (2007 : 80) berpendapat bahwa pergaulan bisa diartikan sebagai hubungan antar individu yang didalamnya menyangkut tingkah laku, perasaan, dan jati diri. Pengertian pergaulan sama halnya dengan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubunganhubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antar kelompok manusia, serta antara orang perorang dan kelompok manusia (Soekanto, 2012 :55). Menurut Soerjono Soekanto Hakikat hidup bermasyarakat itu sebenarnya adalah terdiri dari relasi-relasi yang mempertemukan mereka dalam usaha-usaha bersama dalam aksi dan tindakan yang berbalas-balasan. Sehingga orang saling menanggapi tindakan mereka. Dengan demikian, dapat pula diartikan bahwa masyarakat merupakan jaringan relasi-relasi hidup yang timbal balik. Yang satu berbicara, yang lain mendengarkannya; yang satu bertanya, yang lainnya menjawab; yang satu memberi perintah, yang lainnya menaati; yang satu berbuat jahat, yang lain membalas dendam; dan yang satu mengundang, yang lainnya datang.

Jadi selalu tampak bahwa orang saling mempengaruhi. Dan hasil interaksi inilah sangat ditentukan oleh nilai dan arti serta interpretasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi ini (Wualansari,

2009 :35). Syarat dari terjadinya interaksi sosial ini adalah adanya kontak sosial dan adanya komunikasi yang dilakukan.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pergaulan multikultural adalah interaksi sosial yang dilakukan oleh baik individu kepada kelompok maupun kelompok kepada individu maupun kelompok kepada kelompok dalam masyarakat yang didalamnya memuat identitas kultural yang berbeda. Dalam pergaulan multikultural mengisyaratkan terjadinya kontak sosial dan komunikasi sosial dan bila itu tidak terjadi dengan baik bias menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan yang dapat menyebabkan konflik sosial dan ketidak terpaduan sosial.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman, management diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan (Usman, 2004:3). Dalam beberapa konteks manajemen dan pengelolaan mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna "to control" yang artinya mengatur dan mengurus. Menurut M. Manullang, manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Manullang 2000:5).

Terkait dengan proses pelaksanaan manajemen, Nanang Fattah (2004:1) mengemukakan bahwa: "Dalam proses manajemen terlihat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu: Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pemimpinan (Leading), dan Pengawasan (Controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien". Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengintegrasian, pengendalian dan semua daya yang dilakukan untuk mengontrol dan menggunakan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang dimaksudkan. Pengelolaan pergaulan multikultural dapat diartikan proses mengontrol dan mengawasi interaksi dalam masyarakat multikultural

dengan tujuan terwujudnya keterpaduan sosial.

Dunia adalah tempat untuk multikulturalisme. suatu wilayah daerah dan negara adalah tempat untuk multikulturalisme. Multikulturalisme ditemukan di mana saja di permukaan bumi ini. Menurut May, multikulturalisme adalah suatu pendekatan yang menggantikan universalisme dan yang memperkenalkan etnik yang tidak perlu dan tidak mendukung ke dalam wilayah perhatian atau kegiatan 'masyarakat sipil'.(May, 1999). Steinberg menguraikan bahwa multikulturalisme adalah suatu posisi multicultural untuk menjawab perbedaan yang berkaitan dengan rasial, golongan sosial-ekonomi, jender, bahasa, budaya, jenis kelamin, dan ketunaan. (Steinberg, 2009: 217).Calhoun, Light, & Keller mendefinisikan bahwa multikulturalisme adalah suatu pendekatan untuk kehidupan dalam suatu masyarakat pluralistic, yang menuntut untuk menemukan cara-cara bagi orang-orang untuk memahami dan berhubungan dengan yang lainnya yang tidak tergantung kepada persamaan mereka, tetapi lebih pada penghargaan dari perbedaan mereka.(Craig;, C, 2012) menambahkan bahwa multikulturalisme lebih dari pada suatu resep obat bagi hubungan antargroup yang lebih baik di Amerika Serikat. Hal itu juga dikenal sifat multikultural yang meningkat dari hubungan social dalam dunia yang lebih terpadu secara internasional dan global. (Craig; 2012: 137). Tidak ada satu negara pun di permukaan bumi ini tanpa multikulturalisme. Hal itu dibuktikan dengan banyak negara seperti the United States, Canada, Australia, French, United Kingdom, dan Indonesia sebagai contoh negara yang ditumbuhi dengan multikulturalisme. Di negara-negara tersebut, multikulturalisme merupakan kebijakan, doktrin, filosofis, ideologi, dan sekaligus realitas yang menekankan pada karakteristik unik budaya yang berbeda asal dari berbagai etnik, agama, dan bangsa namun dengan status yang sama. Semuanya berkumpul dan hidup secara damai dan adil dalam suatu negara. Kondisi hidup seperti itu mengandung makna bahwa setiap orang atau kelompok orang harus saling menghargai perbedaan perspektif yang berkembang dan bertahan melalui berbagai macam pengalaman dan latar belakang perbedaannya Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa bergantung pada orang lain dalam memenuhi keperluan hidupnya. Disadari atau tidak, kita semua memiliki sifat saling membutuhkan yang begitu kuat. Kebutuhan manusia dapat dipenuhi ketika antara manusia yang satu dan yang lain memiliki kesadaran dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain Di tengahnya masyarakat kita sering terjadi kondisi nyata yang menunjukkan adanya perbedaan dengan orang lain.

Perbedaan-perbedaan itu sebenarnya hal yang sangat lumrah. Namun, perbedaan sering menimbulkan konflik dalam masyarakat. Apabila konflik tersebut tidak dapat dikendalikan, maka akan menimbulkan tindak kekerasan. Hakikat kehidupan adalah perubahan, dan jika ada yang abadi dalam kehidupan, maka keabadian itu adalah perubahan. Kehidupan tidak pernah ada tanpa perubahan dan dalam perubahan dengan sendirinya selalu memunculkan konflik, yaitu konflik antara yang akan diubah, pengubah dan kebaruan yang lahir dari perubahan itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai jenis konflik adalah suatu keniscayaan. Suatu masyarakat pasti pernah mengalami konflik, baik antara anggotanya maupun dengan kelompok masyarakat lain. Istilah konflik sering mengandung pengertian negatif, sebab cenderung dimaknai sebagai lawan kata dari keserasian, kedamaian, dan keteraturan. Konflik sering pula diasosiasikan dengan ancaman ataupun penggunaan kekerasan. Padahal jika dikelola dengan baik, konflik tidak selamanya diakhiri dengan kekerasan.

Indonesia dipandang sebagai contoh masyarakat majemuk dengan pandangan pluralisme karena anekaragam masyarakat dan kebudayaannya, setidaknya-tidaknya pada masa lampau, kurang berinteraksi satu sama lain, antara lain karena faktor geografis kepulauan. Hipotesa ahli ilmu politik seperti P. Laslett mungkin benar bahwa sistem kekuasaan otoritarian adalah bentuk adaptif dari suatu pengaturan masyarakat majemuk dengan populasi besar yang terikat sebagai suatu negara-bangsa yang tinggal di pulau-pulau yang banyak dan tersebar luas. Melonggarkan kekuasaan otoritarian itu akan membawa persoalan besar bagi integrasi nasional. Kritik orang atas konsep pluralitas itu datang silih berganti. Namun tak satu pun yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan. (Parekh, 1997: 87) Konsep Furnivall itu kemudian diadopsi oleh M.G. Smith, salah seorang tokoh penting yang mengembangkan teori tentang masyarakat majemuk dalam antropologi. Smith menemukan konsep masyarakat majemuk ini penting untuk kepentingan analisa ketika untuk pertama kali ia menemukan anekaragam bentuk struktural pada masyarakat Karibia yang ditelitinya, dan kemudian membandingkan-bandingkannya. Menurut Smith, model masyarakat majemuk yang berlandaskan ras mengabaikan kemungkinan landasan lain, seperti kelas sosial atau agama. Smith berargumen konsep pluralisme diperlukan sebagai konsep payung yang akan digunakan secara komparatif dalam antropologi sosial. Akan tetapi, ada sebagian antropolog yang mengkritik pendapat Smith bahwa ia tidak berhasil

menjelaskan konteks historis dari apa yang disebutnya masyarakat majemuk itu. Mereka mengemukakan bahwa masyarakat majemuk itu akan lebih berguna jika dilihat sebagai konteks historis daripada sebagai bentukbentuk struktural. (Smith, 1965: 241). Sebagian antropolog lain menaruh curiga bahwa konsep masyarakat majemuk adalah konstruksi kolonial. Dengan konsep ini muncul kemudahan bagi kaum kolonialis untuk mengembangkan pengaturan keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan dengan mengatasnamakan integrasi nasional. Dengan konsep tersebut terbuka kemungkinan potensi untuk mempraktikkan diskriminasi ras – dan kadang-kadang etnik – kategorisasi dan kodifikasi hukum. Dalam bentuk yang paling ekstrim, pluralisme rasial digunakan untuk melakukan segregasi, mengisolasi, dan menyingkirkan suatu etnik, misalnya seperti yang terjadi dalam politik perbedaan warna kulit di Afrika Selatan pada abad yang lalu. Teori masyarakat majemuk mengabaikan ciri polietnik kebanyakan masyarakat di Dunia Ketiga sehingga kurang mempengaruhi kecenderungan kajian pascakolonial maupun kajian etnik. Seraya terus menyesuaikan diri terhadap kritik-kritik yang dilancarkan kepadanya, teori Smith mengalami kemunduran secara konseptual karena terdesak oleh teori-teori pluralisme kebudayaan. Berkembangnya teori-teori pluralisme kebudayaan didorong antara lain oleh (1) lahirnya negara-negara baru merdeka setelah Perang Dunia II; (2) semakin majunya teknologi komunikasi yang membebaskan masyarakat-masyarakat yang tadinya terisolasi; (3) meningkatnya kesadaran akan hak-hak sebagai bangsa dalam tatanan dunia; (4) menguat dan menyebarnya pemikiran demokrasi dan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Keempat faktor pendorong ini turut melandasi dibangunnya teori-teori pluralisme kebudayaan yang secara praktis menghendaki pengakuan akan hak-hak yang sama sebagai warga kebudayaan dunia. (Geertz dan Apter, eds. 1969: 107) Pluralisme kebudayaan mencakupi gagasan bahwa perbedaan-perbedaan kebudayaan secara historis di antara berbagai masyarakat seharusnya dihargai oleh penguasa (baca: pemerintah) yang menjamin persamaan hak-hak mereka dalam masyarakat bangsa. Banyak orang kemudian berpandangan bahwa konsep pluralisme kebudayaan dapat diterapkan secara lebih universal daripada model masyarakat majemuk yang dianggap mempertahankan status-quo kekuasaan kolonial.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Dalam konteks masyarakat multikultural, upaya mencegah konflik dan adanya anggapan bahwa berkonflik merupakan hal negatif adalah sama sekali

tidak relevan. Konflik bukanlah sesuatu yang dapat dihindari atau disembunyikan, tetap harus diakui keberadaannya, dikelola, dan diubah menjadi kekuatan untuk perubahan yang positif Indonesia sebagai negara yang dihuni oleh masyarakat multikultural ditunjukkan antara lain dengan: 1) lebih dari 700 bahasa yang digunakan sehari-hari oleh setiap kelompok masyarakat pemakainya; 2) penduduk yang berbeda agama yang terdiri atas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha; dan 3) tradisi yang berasal dari nenek moyang setiap suku bangsa. Keberagaman masyarakat Indonesia dituangkan dalam moto nasional “Bhinneka Tunggal Ika” Moto tersebut melambangkan segala perbedaan kultural sebagai dasar kebijakan nasional, doktrin, filosofis, ideologis, dan realitas sejak awal pembentukan bangsa dan Negara Indonesia. Kemajemukan kebudayaan, negara-bangsa, dan nasionalisme. Negara-bangsa seperti Indonesia dapat dikatakan lahir dan berkembang bersamaan dengan menguatnya semangat nasionalisme di dunia yakni pada separuh pertama abad kedua puluh. Konsep nasionalisme sendiri bersandikan tiga unsur, yaitu kesadaran identitas bersama, suatu ideologi mengenai kesejarahan bersama dan rasa senasib sepenanggungan, dan adanya suatu gerakan sosial bersama demi mencapai satu tujuan bersama. Nasionalisme akan menguat apabila setiap unsur di atas mengalami peningkatan akibat adanya kekuatan dari luar yang dianggap mengancam. Hadirnya musuh dari luar, misalnya, akan dapat memperkuat nasionalisme itu. (Smith, 1981: 108) Kemajemukan kebudayaan, selain merupakan ciri yang melekat pada negara-bangsa Indonesia, juga menjadi factor pendorong dikembangkan dan diterapkannya model kebijakan masyarakat majemuk karena model itu dapat diharapkan mampu mengikat keanekaragaman yang ada. Akan tetapi, karena unsur-unsur pembentuk negara-bangsa Indonesia itu sangat beranekaragam baik secara geografi, fisik, populasi, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, maka model kebijakan pluralistik pada masa itu dianggap paling masuk akal dan memenuhi kebutuhan sebagai pengikat kesatuan nasional yang terintegrasi. Akan tetapi, di pihak lain, unsur dari negara-bangsa yang dominan akan memperoleh posisi yang lebih diuntungkan daripada unsur yang tidak dominan. Secara teoretis, unsur dominan kerap kali diasosiasikan dengan unsur mayoritas, meskipun hal ini tidaklah selalu benar. Banyak contoh Konsep kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah seolah terlupakan pada masa reformasi, dan bahkan konsep ini seolah dicurigai sebagai politik kebudayaan Orde Baru yang otoritarian, di mana kontrol oleh pemerintah pusat sangat besar sehingga peluang untuk mencapai

kesetaraan itu menjadi minimal. Di sisi lain, upaya menemukan model multikulturalisme Indonesia yang mampu merekat kembali persatuan dan integrasi nasional juga belum berhasil. menunjukkan bahwa unsur mayoritas bukan unsur dominan dalam ekonomi, atau unsur minoritas justru dominan dalam konteks ekonomi. Nasionalisme dalam konteks negara bangsa ini sebagai landasan integrasi nasional menjadi signifikan dan instrumental dalam mempersatukan seluruh rakyat dalam batas-batas wilayah negara-bangsa, dan dalam memobilisasi rakyat untuk melawan pihak atau bangsa lain yang mengancam kedaulatan negara bangsa. Menurut (Asmuri, 2017) bahwa kemajemukan budaya di Indonesia, karena Indonesia memiliki sekitar 300 suku, 200 bahasa daerah dan ribuan aspirasi kultural, maka dalam interaksi social dituntut untuk bersikap toleran. Sejalan dengan pendapat tersebut, (Slamet et al., 2017) menyatakan bahwa nilai-nilai pendidikan multicultural berasal dari keanekaragaman budaya, bahasa, suku, agama. Sehingga untuk membangun harmoni social perlu toleransi dan menghapuskan sikap primordial. Multikulturalisme sebagai Pendekatan dan sebagai Kebijakan Nasional Sebagaimana dikemukakan di atas multikulturalisme adalah suatu ideologi jalan keluar dari persoalan mundurnya kekuatan integrasi dan kesadaran nasionalisme suatu bangsa sebagai akibat dari perubahan-perubahan di tingkat global. Indonesia, khususnya, mengalami perubahan tersebut belakangan ini. Setidak-tidaknya kekhawatiran terjadinya kemunduran dalam kesadaran nasionalisme telah terbukti akhir-akhir ini. Contoh yang paling nyata adalah semakin meningkatnya keinginan beberapa daerah tertentu untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun sebegitu jauh pemerintah masih mampu meredam kehendak tersebut sehingga perceraian daerah-daerah tersebut belum terwujud pada saat ini. Selain itu, konflik-konflik yang terjadi akibat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi juga meningkat pada awal abad kedua puluh satu ini. Sebagian orang berpendapat bahwa konflik-konflik itu terjadi karena kontrol negara yang selama otoriter telah melonggar, tetapi menjadikan kontrol itu kembali ketat nampaknya bukan jalan keluar yang terbaik karena Indonesia (pemerintah) akan berhadapan dengan arus kekuatan global yang lebih menyukai demokrasi, sehingga secara politik negara ini akan tersingkir dari pergaulan dunia.

Akan tetapi, membuka lebih lebar lagi “keran-keran” keterbukaan juga mengandung risiko jangka panjang, yakni kemungkinan tercerai-berainya negara-bangsa ini menjadi sejumlah negara-negara yang lebih kecil. (Sunarto, 2004: 61) Hal ini yang mendorong sebagian ahli untuk

memikirkan alternatif solusi terbaik agar tidak terjebak kedalam perpecahan, yakni jalan multikulturalisme. Sebagian besar kebudayaan multikultural di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari tiga model multikulturalisme . (Parekh, 1997: 2001) Pertama, model yang mengedepankan nasionalitas (nationality). Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan anekaragam suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integrasi. Model ini memandang setiap orang – bukan kolektif – berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara. Sebagai konsekuensi dari diterapkannya model ini adalah tidak diperhatikannya akar kebudayaan etnik-etnik penyusun negara, dan menjadikannya dengan akibat yang tak terbayangkan sebelumnya. sebagai masa lampau saja. Banyak orang menuding model ini sebagai penghancur kebudayaan etnik. Model kebijakan multikulturalisme ini rentan terjerumus ke dalam kekuasaan otoritarian karena kekuasaan untuk menentukan unsurunsur integrasi nasional tersebut berada di tangan suatu kelompok elite tertentu yang menguasai negara. Nasionalitas dan nasionalisme menjadi tameng bagi para elite untuk mencapai tujuannya. Perancis adalah contoh negara yang menerapkan model ini. Di negara ini diberlakukan aturan-aturan bagi semua individu warga negara Perancis tanpa memperhatikan latar belakang etnik, dan sekaligus larangan untuk memanifestasikan identitas kebudayaan etnik atau agama ke tatanan publik. Larangan menggunakan jilbab di Perancis baru-baru ini adalah salah satu contoh bekerjanya model nasionalitas tersebut. Kedua, model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para founders. Selain itu, kesatuan bahasa juga merupakan ciri nasional-etnik ini. Model ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki sangkut paut hubungan darah dengan etnis pendiri bangsa akan tersingkir menjadi orang luar dan diperlakukan sebagai orang asing. Jerman dikenal sebagai bangsa yang menggunakan model multikulturalisme ini secara konsisten. Khususnya pada masa lampau, orang Jerman yang diakui sebagai bangsa Jerman adalah orang yang berasal dari etnik Arya, dan tindakan pemurnian ras Jerman menjelang Perang Dunia II adalah sebuah contoh ekstrim bekerjanya model multikulturalisme nasionalitas-etnik. Ketiga, model multikultural-etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Dalam model ini keanekaragaman menjadi realitas yang harus diakui dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga negara

diperhatikan. Model ini diterapkan terutama oleh negara-negara yang memiliki persoalan orang pribumi (aborigines) dan orang pendatang (migrants) seperti Kanada dan Australia. Isu-isu yang muncul karena penerapan kebijakan ini tidak hanya keanekaragaman kolektif dan etnik, tetapi juga isu mayoritas-minoritas, dominan-tidak dominan. Persoalannya menjadi lebih kompleks lagi karena ternyata mayoritas tidak selalu berarti dominan, karena berbagai kasus menunjukkan bahwa minoritas justru dominan dalam ekonomi. Apabila kekuasaan negara lemah, karena prioritas kekuasaan dilimpahkan kepada anekaragam kolektif sebagai konsekuensi pengakuan negara, maka negara mungkin diramaikan oleh konflik-konflik internal berkepanjangan yang pada gilirannya akan melemahkan negara itu sendiri. Kalau kita simak secara mendalam ketiga model di atas, nampaknya sukar bagi kita untuk mengatakan model yang mana yang sesuai untuk kondisi Indonesia karena kesesuaian dan keberlakuan model juga ditentukan oleh kondisi-kondisi obyektif Indonesia seperti geografi kepulauan yang sangat luas dengan jarak yang berjauhan satu sama lain, keanekaragaman etnik dan agama dan golongan sosial, jurang sosial-ekonomi yang semakin dalam, dan – yang tak kalah penting adalah arus besar (mainstream) politik dan ekonomi dunia global yang mempengaruhi arah kebijakan multikulturalisme di Indonesia. Model multikulturalisme seharusnya adalah suatu bentuk sosio-kultural adaptif yang sesuai dengan kondisi-kondisi menyeluruh Indonesia. Model multikulturalisme nasionalitas jelas tidak relevan dibicarakan di Indonesia, karena sejak negara ini dibangun, meskipun istilah multikulturalisme belum dikenal, bangsa Indonesia sudah jelas menyatakan dirinya “Bhinneka Tunggal Ika” yang menunjukkan diperhatikannya keanekaragaman kebudayaan.

Patut pula kita catat bahwa ketiga model di atas berguna untuk kepentingan analisis karena ketiganya bukanlah kontras satu sama lain mengingat dalam setiap model terdapat juga unsur-unsur yang mencerminkan sebagian isi model lainnya . Model multikulturalisme memiliki premis bahwa masing-masing kebudayaan diakui dan harus menjaga kebudayaannya sendiri, hidup berdampingan secara damai. Hingga kini masih terus diupayakan untuk menemukan model yang pas untuk kondisi Indonesia masa kini dan proyeksi ke masa depan. Salah satu wacana penting mengenai multikulturalisme adalah pendidikan multikultural sebagai strategi jangka panjang meskipun konsep ini mengundang banyak kontroversi pendapat. Salah satu kritiknya adalah bahwa pendidikan multikultural itu bersifat “memecah-belah” karena

pengakuan terhadap hakikat hidup setiap kebudayaan akan melahirkan bentuk-bentuk yang khas pendidikan multikultural yang belum tentu berujung pada kepentingan integrasi kebudayaan secara nasional.

1. Kemajemukan kebudayaan, merupakan ciri yang melekat pada negarabangsa Indonesia, dan menjadi factor pendorong dikembangkan dan diterapkannya model kebijakan masyarakat majemuk karena model itu dapat diharapkan mampu mengikat keanekaragaman yang ada.
2. Upaya menemukan model multikulturalisme Indonesia yang mampu merekat kembali persatuan dan integrasi nasional juga belum berhasil. menunjukkan bahwa unsur mayoritas bukan unsur dominan dalam ekonomi, atau unsur minoritas
3. Nasionalisme dalam konteks negarabangsa ini sebagai landasan integrasi nasional menjadi signifikan dan instrumental dalam mempersatukan seluruh rakyat dalam batas-batas wilayah negara-bangsa, dan dalam memobilisasi rakyat untuk melawan pihak atau bangsa lain yang mengancam kedaulatan negara bangsa. 3. Multikulturalisme sebagai Pendekatan dan sebagai Kebijakan Nasional Sebagaimana dikemukakan di atas multikulturalisme adalah suatu ideologi jalan keluar dari persoalan mundurnya kekuatan integrasi dan kesadaran nasionalisme suatu bangsa sebagai akibat dari perubahan-perubahan di tingkat global. Indonesia,
4. Konflik-konflik itu terjadi karena kontrol negara yang selama otoriter telah melonggar, tetapi menjadikan kontrol itu kembali ketat nampaknya bukan jalan keluar yang terbaik karena Indonesia (pemerintah) akan berhadapan dengan arus kekuatan global yang lebih menyukai demokrasi, sehingga secara politik negara ini akan tersingkir dari pergaulan dunia. Akan tetapi, membuka lebih lebar lagi “keran-keran” keterbukaan juga mengandung risiko jangka panjang, yakni kemungkinan tercerai-berainya negara-bangsa ini menjadi sejumlah negara-negara yang lebih kecil.
5. Alternatif solusi terbaik agar tidak terjebak kedalam perpecahan, yakni jalan multikulturalisme. Sebagian besar kebudayaan multikultural di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari tiga model multikulturalisme yaitu model yang mengedepankan nasionalitas (nationality), Model ini memandang setiap orang – bukan kolektif – berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara. model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan

dengan para founders. Dan model multikultural-etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjadi bahan acuan dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian dengan membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berhubungan dengan etnisitas dan integrasi pada masyarakat multicultural.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nabila Quway (2020)	Integrasi Multikultural dalam masyarakat Multietnis di Kota Semarang	Integrasi multikultural yang terjadi antara kedua etnis tersebut di Semarang sudah berjalan cukup baik. Baik etnis Jawa maupun Etnis Cina keturunan sama-sama berusaha untuk tidak mengganggu aktivitas etnis lain. Dalam masyarakat etni Jawa maupun etnis Cina Keturunan sudah ada sikap menghargai dan menghormati budaya etnis lain. Meskipun demikian masih terdapat pandangan negatif terhadap kedua etnis tersebut. Tanggapan ini tentunya sangat berbahaya bagi keberlangsungan integrasi multikultural yang sudah terbentuk. Untuk itu perlu diadakan usaha dari semua pihak terkait untuk menghilangkan hal tersebut meskipun secara perlahan-lahan.
2.	Irawan Tasnir, Asmunandar, Bahri (2022)	Sejarah Terbentuknya Masyarakat Multikultural di Kecamatan Kalaena, 1977-2015	Terciptanya masyarakat multikultural di Kecamatan Kalaena disebabkan oleh kedatangan para transmigran, baik transmigran nasional dari pulau Jawa, Bali, dan Lombok serta transmigran lokal pada tahun 1977 hingga sekitar tahun 1980an dengan tujuan utama yaitu untuk peningkatan ekonomi dan taraf hidup. Perkembangan masyarakat multikultural diawali

			<p>dengan adanya interaksi sehingga dalam prosenya, enkulturasi (pembudayaan) serta akulturasi dapat terjadi dengan baik. Selain itu, pendidikan formal dan serta pendidikan multikultural juga memegang aspek penting bagi integrasi antar masyarakat sehingga tidak ditemui konflik yang besar antar etnis maupun agama dari tahun 1977 hingga 2015.</p>
3.	Isnaeni Dian Imanina K (2018)	Interaksi Sosial Etnis Lokal dan Etnis Tionghoa dalam pencegahan konflik di Kota Makassar	<p>Interaksi sosial antara Etnis Lokal dan Tionghoa di Kota Makassar berjalan dengan harmonis. Etnis lokal dan tionghoa hidup secara berdampingan dengan saling menghargai dan menghormati serta saling membutuhkan satu sama lain. Kerjasama yang dijalin dalam bentuk gotong royong, tenaga kerja dan perdagangan.</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian *Mix Methode* yang menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti akan menggunakan pengamatan untuk mengungkapkan data dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat. Pendekatan ini dipilih karena peneliti akan menggunakan pengamatan untuk mengungkapkan data. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuan dari metode ini adalah untuk membantu peneliti mengumpulkan informasi.

Adapun pendekatan lain yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena peneliti akan menggunakan pengamatan untuk mengungkapkan data dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat. Pendekatan ini dipilih karena peneliti akan menggunakan pengamatan untuk mengungkapkan data. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi dimana suatu metode yang dapat dipakai untuk memahami arti atau pengertian, struktur dan hakikat dari pengalaman hidup seseorang atau kelompok atas sesuatu gejala yang dialami.

Penelitian ini adalah jenis penelitian *Mix Methode* yang menggunakan pendekatan deskriptif yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara Kuantitatif dengan menggunakan rumus Cochran untuk menentukan jumlah sampel sedangkan untuk Kualitatif Deskriptif dalam penelitian ini dengan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber data Primer yang langsung diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian. Adapun informan dalam wawancara yaitu masyarakat multikultural di Kota Makassar dan berumur lebih dari 17 Tahun.

Beberapa hal dasar yang perlu dipahami tentang pendekatan ini adalah :

- a. Apoche (*epoche* atau *bracketing*) artinya melepaskan praduga, asumsi atau meletakkan semua konsep bila hendak mempelajari dan mengerti sesuatu;
- b. Intuisi (*intuition*) yang mendorong peneliti untuk menangkap hakikat dari gejala tersebut;
- c. Keterarah (*intentionality*) hal ini berarti bahwa kesadaran harus terarah pada suatu gejala, fakta dan realitas akan diketahui dan mengerti.
- d. Dunia yang dihidupi (*lebenswelt*), setiap peristiwa atau gejala selalu terjadi atau dialami dalam konteksnya atau dalam dunia nyata.

Kehadiran peneliti sebagai orang yang melakukan observasi dalam pengamatan dengan cermat terhadap objek penelitian. Tujuan untuk memperoleh data tentang penelitian ini, maka peneliti turun di lapangan dalam mengikuti beberapa kegiatan yang terkait dengan instrument penelitian, sekaligus pengumpul data sehingga keberadaan di lokasi mutlak diperlukan. Demikian pula subjek atau informal mengetahui kehadiran peneliti dalam statusnya sebagai peneliti. Setelah peneliti memposisikan diri sebagai subjek yang dijadikan objeknya dalam penelitian adalah masyarakat yang ada di Kota Makassar.

3.2. Populasi dan Sampel

A. Populasi.

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dimanamemiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah semua etnis Makassar yang ada di Kota Makassar. Dikarenakan jumlah data populasiyang sangat besar dan tidak dapat diperoleh oleh peneliti maka pada penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Cochran untuk menentukan jumlah sampel penelitian apabila populasi tidak diketahui. Formula Cochran dianggap sangat tepat dalam situasi dengan populasi besar (Sujalu et. al, 2021).

B. Sampel

Sugiyono (2019), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian kuantitatif adalah subjek penelitian yang dianggap mewakili populasi yang kemudian disebut sebagai responden penelitian. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini adalah *probability sampling* methods yaitu metode pemilihan sampel secara

random atau acak. Dengan metode ini seluruh populasi diasumsikan memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan rumus berikut:

$$N = \frac{z^2 pq}{e^2}$$

N = Jumlah sampel yang diperlukan

z = nilai standar yang diperoleh dari tabel distribusi normal Z dengan simpangan 5% dengan nilai 1,96

p = nilai proporsi yang didapat dari penelitian sebelumnya (kepastakaan), apabila proporsi tidak diketahui, maka perkiraan proporsi sebesar 50% (0,5)

q = 1 – p

e = tingkat kesalahan sampel (sampling error) 10% = 0,1 dari tingkat kepercayaan 90% perhitungan:

$$N = \frac{z^2 pq}{e^2}$$

$$N = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times (1-0,5)}{0,1^2}$$

$$N = 96,04$$

Berdasarkan perhitungan sampel tersebut, maka jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 96 responden, yang kemudian dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 100 responden.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dibagi menjadi data primer dan data sekunder berdasarkan sumbernya. Data primer berasal dari wawancara dengan anggota masyarakat multicultural. Data sekunder berasal dari sumber tidak langsung yang diberikan kepada peneliti (Sugioyono, 2005). Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara langsung atau tidak langsung dari berbagai literatur, seperti buku, media masa (cetak atau elektronik), jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, dan keterangan asli dari lembaga atau instansi terkait.

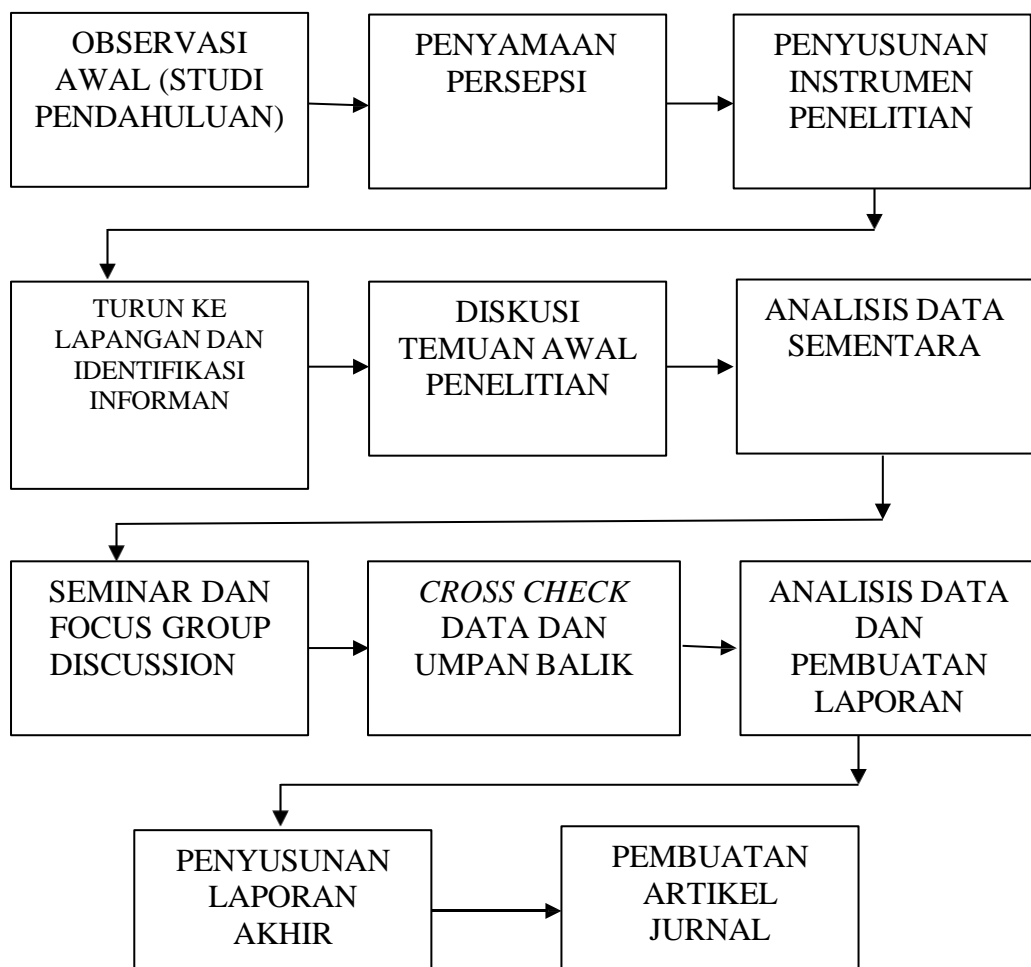
Salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara, yang merupakan percakapan yang difokuskan pada suatu masalah, dan tanya jawab, yang merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berinteraksi secara fisik. Metode lain adalah observasi atau pengamatan. Disamping itu

dilakukan survei untuk mengukur tingkat integrasi dan persepsi etnisitas.

3.4 Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan model interaktif (interactive model analysis), analisis data menurut Miles & Huberman (1992) terdiri dari tiga alur kerja: mengurai data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan memverifikasi. Tahapan operasional penelitian yang akan dilakukan selama 6 bulan dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 3.1. Langkah-Langkah Operasional Penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Data Dan Pembahasan

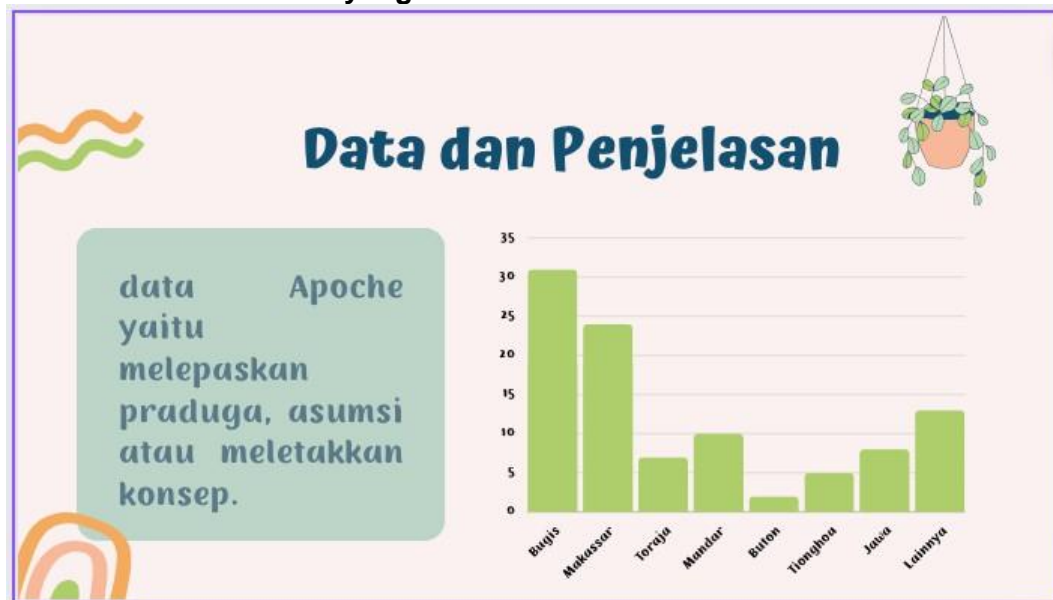
Hasil penelitian diperoleh dari wawancara dengan anggota masyarakat multicultural serta dokumen lain yang menunjang dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi dimana suatu metode yang dapat dipakai untuk memahami arti atau pengertian, struktur dan hakikat dari pengalaman hidup seseorang atau kelompok atas sesuatu gejala yang dialami. Adapun data dari penelitian Fenomenologi pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1 Jumlah Penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin Kota Makassar

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar (Jiwa)								
	Laki laki			Perempuan			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Mariso	28903	29007	29246	28691	28788	29484	57594	57795	58730
Mamajang	27520	27542	28632	28536	28552	29661	56056	56094	58293
Tamalate	90757	91174	94013	90776	91174	94419	181533	182348	188432
Rappocini	70802	70865	73548	73817	73868	77065	144619	144733	150613
Makassar	40699	40763	40771	41443	41502	41466	82142	82265	82237
Ujung Pandang	11895	11903	12058	12631	12638	12793	24526	24541	24851
Wajo	15002	15042	14512	15031	15068	14991	30033	30110	29503
Bontoala	27339	27410	27409	27763	27829	27792	55102	55239	55201
Ujung Tanah	17995	18087	18401	17952	18040	18344	35947	36127	36745
Kepulauan Sangk	7051	7087	7486	7136	7171	7495	14187	14258	14981
Tallo	73289	73552	74581	72111	72356	73474	145400	145908	148055
Panakkukang	69693	69762	71640	69942	69997	72564	139635	139759	144204
Manggala	73649	74113	79753	73900	74349	80713	147549	148462	160466
Biringkanaya	104997	105584	107463	105079	105644	108357	210076	211228	215820
Tamalanrea	51415	51471	52878	51805	51851	53384	103220	103322	106262
Jumlah	711006	713362	732391	716613	718827	742002	1427619	1432189	1474393

Dari gambar diatas dapat dilihat sebaran menurut jumlah penduduk menurut wilayah kecamatan dimana peneliti melakukan penelitian dan dapat dilihat juga sebaran dari jenis kelamin di Kota Makassar.

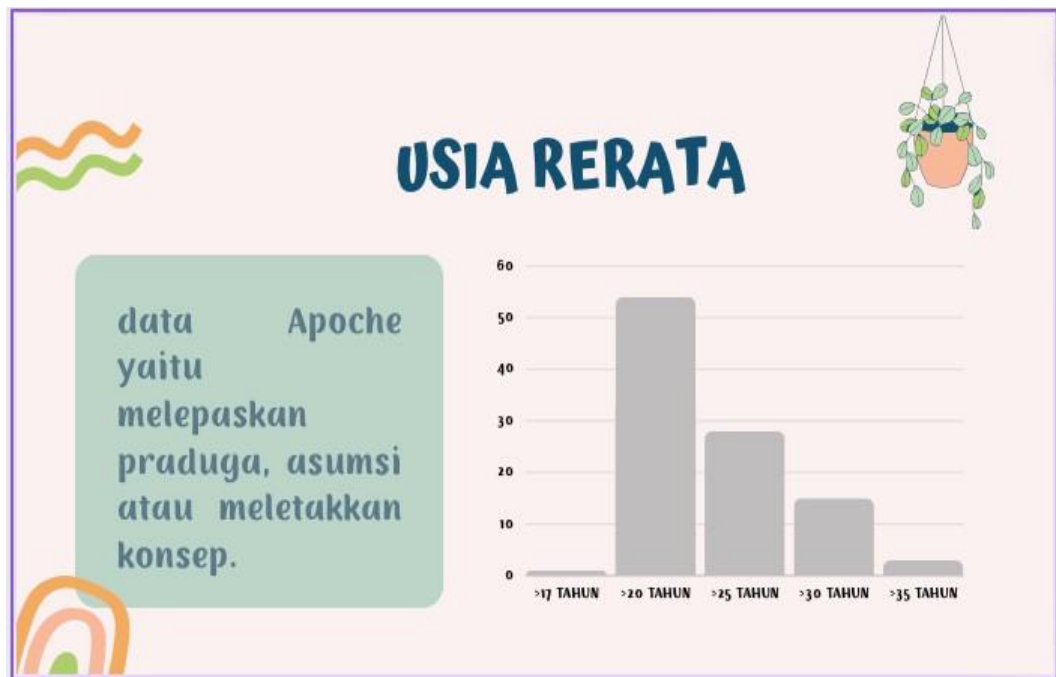
Gambar 4.2 Data dari Penelitian Fenomenologi melepas praduga, asumsi atau meletakkan konsep untuk mendapatkan informasi mengenai suku yang ada di Kota Makassar.



Sumber : Data dikelolah Peneliti

Dari gambar diatas yang merupakan data Apoche dari Penelitian Fenomenologi yang melepas praduga, asumsi atau meletakkan konsep untuk mendapatkan informasi mengenai suku yang ada di Kota Makassar, didapatkan hasil yaitu suku yang paling dominan berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu Bugis sebesar kurang lebih 31 (pada rentang 30-35), kemudian Makassar kurang lebih 24 (pada rentang 20-25), disusul suku lainnya sebanyak 13 (pada rentang 10-15), Mandar sebanyak 10, Lalu Jawa sebanyak 8 (pada rentang 5-10), Toraja kurang lebih 7 (pada rentang 5-10), Lalu Tionghoa sebanyak 5, dan terakhir Buton kurang lebih 2 (pada rentang 0-5). Suku yang dijelaskan pada gambar merupakan suku yang jumlahnya signifikan di Kota Makassar.

Gambar 4.3. Data dari Penelilian Fenomenologi melepas praduga, asumsi atau meletakkan konsep untuk mendapatkan informasi mengenai Rerata Usia yang ada di Kota Makassar.



Sumber : Data Dikelolah Peneliti

Dari gambar diatas yang merupakan data Apoche dari Penelitian Fenomenologi yang melepas praduga, asumsi atau meletakkan konsep untuk mendapatkan informasi mengenai Rerata Usia yang ada di Kota Makassar, didapatkan hasil yaitu Paling dominan adalah umur >20 tahun yaitu berada pada kisaran rentang 50-60, kemudian disusul umur >25 tahun yaitu berada pada kisaran rentang 20-30, lalu umur >30 tahun berada pada kisaran 10-20, umur >35 tahun pada kisaran 0-10 dan terakhir >17 tahun dengan kisaran pada rentang 0-10.

- a. **Mengikuti acara kebudayaan di Kota Makassar sesuai dengan budaya sendiri**

Gambar 4.4 Data dari Masyarakat yang mengikuti kegiatan di Kota Makassar



Sumber : Data dikelolah Peneliti

Dari data tersebut diatas menjelaskan bahwa Jumlah masyarakat yang pernah mengikuti acara kebudayaan sesuai dengan budaya mereka sendiri adalah lebih banyak. Kemudian disusul yang menyatakan sering, kemudian kadang-kadang, lalu yang menyatakan sangat sering. Akan tetapi jumlah masyarakat yang tidak pernah mengikuti juga terbilang tidak sedikit.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang diperoleh, mengatakan bahwa :

“ saya pernah ikut acara kebudayaan seperti pengantin dan acara acara kebudayaan sesuai dengan suku saya”---MS

“saya suka mengikuti acara kebudayaan tapi tidak sering”---RD

“bukan tidak suka, tapi saya punya banyak kesibukan”---AK

“saya sering ikut acara seperti kebudayaan itu, karena bisa kenal kenal orang lain” ---IQ

- b. **Mengikuti acara kebudayaan di Kota Makassar sesuai dengan budaya orang lain**

Gambar 4.5 Data dari Masyarakat dengan kegiatan kebudayaan di Kota Makassar



Data yang diperoleh dari masyarakat yang mengikuti acara kebudayaan di Kota Makassar sesuai dengan budaya orang lain yang menyatakan pernah mengikuti lebih banyak dan disusul dengan pernyataan kadang-kadang yang hampir sama dengan banyaknya orang yang menyatakan sering, lalu disusul oleh yang menyatakan tidak pernah dan terakhir yang menyatakan sangat sering.

Hal tersebut diperkuat dengan beberapa hasil wawancara berikut :

“saya pernah mengikuti acara kebudayaan yang tidak sesuai dengan budaya saya karena kegiatan itu merupakan kegiatan tahunan yang sering di rayakan” MD

“saya senang mengikuti acara kebudayaan yang tidak sesuai dengan budaya saya karena bisa memberikan saya pengalaman baru” IR

“saya pernah mengikuti acara kebudayaan karena unik dan ramai” DK

- c. **Mengikuti acara kebudayaan di Kota Makassar dan mengerti maknanya**

Gambar 4.6 Data dari Masyarakat dengan kegiatan kebudayaan di Kota Makassar



Data yang diperoleh dari keterkaitan masyarakat mengikuti acara kebudayaan di Kota Makassar dan mengerti maknanya diperoleh hasil yaitu bahwa paling dominan yang menyatakan sebagian masyarakat mengikuti acara kebudayaan namun kurang mengerti isi dari makna acara yang tengah berlangsung, kemudian disusul dengan yang menyatakan mengerti, lalu yang mneyatakan ragu-ragu yang hampir sama banyaknya dengan yang menyatakan tidak mengerti dan yang terakhir adalah yang menyatakan sangat mengerti.

Hal tersebut diperkuat dengan beberapa hasil wawancara berikut :

“ saya mengikuti acara namun kurang mengerti artinya”---DK

“acara yang diikuti tidak didahului dengan memberikan pengertian”-----ANS

‘saya kurang mengerti arti acaranya tapi saya suka keramaian’---- KP

d. Kedatangan pada acara yang diadakan dinas kebudayaan Kota Makassar

Data dari Masyarakat dengan kegiatan kebudayaan di Kota Makassar
Gambar 4.7 Data dari Masyarakat dengan kegiatan kebudayaan di Kota Makassar



Keterkaitan Masyarakat dengan kegiatan kebudayaan di Kota Makassar dengan kegiatan kebudayaan yang pernah datang pada acara yang diadakan dinas kebudayaan Kota Makassar. Sebagian besar mengatakan tidak pernah, lalu kemudian disusul dengan yang menyatakan pernah, kemudian ragu-ragu, lalu sering dan yang paling sedikit adalah yang menyatakan sangat sering.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“saya rasa saya tidak pernah mengikuti kegiatan Dinas Kebudayaan, atau saya pernah tapi saya tidak tahu itu adalah kegiatan dinas kebudayaan” ----- TK

“saya tidak pernah mengikuti acara Dinas Kebudayaan Kota Makassar” ----- BR

“ saya mengikuti acara Dinas Kebudayaan Kota Makassar dari informasi pamphlet yang saya liat di jalan” -- IK

e. Pengetahuan tentang perayaan bulan kebudayaan di Kota Makassar dan segala jenis kegiatannya

Data dari Masyarakat dengan kegiatan kebudayaan di Kota Makassar
Gambar 4.8 Data dari Masyarakat dengan kegiatan kebudayaan di Kota Makassar



Keterkaitan masyarakat dengan kegiatan kebudayaan di Kota Makassar sejauh mana mereka mengetahui tentang perayaan bulan kebudayaan di Kota Makassar dan segala jenis kegiatannya. Dapat dilihat bahwa sebagian besar informan kami tidak mengetahui tentang perayaan bulan kebudayaan di Kota Makassar dan adapun sebagian merasa ragu tentang bagaimana bentuk perayaan pada hari Kebudayaan tersebut. Kemudian disusul dengan yang menyatakan tidak mendapatkan informasi, lalu kemudian mengetahui dan yang terakhir adalah yang menyatakan sangat mengetahui.

Dapat dilihat pada beberapa hasil wawancara berikut :

“ saya Ragu kalau saya pernah ikut dalam perayaan hari Kebudayaan tapi saya tahu tentang bulan kebudayaan dari anak saya yang sedang bersekolah” MK

“Bulan kebudayaan saya tidak tahu tapi hari kebudayaan saya tahu, biasanya ada perayaan perayaan pawai, tapi saya tidak pernah mengikutinya” JF

“saya tidak tahu tentang hari kebudayaan atau perayaannya, yang saya tahu Makassar sering melakukan kegiatan yang terpusat di Pantai Losari yang memperkenalkan tentang Kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan”

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengetahuan masyarakat dalam hal kebudayaan yang masih rendah, sehingga dianggap perlu untuk memberikan informasi yang lebih luas dan mudah dijangkau sesuai dengan pemahaman yang dianggap perlu kepada masyarakat. Rendahnya pengetahuan masyarakat Kota Makassar tentang kebudayaan memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan budaya lokal dan keharmonisan sosial. Ketidaktahuan ini dapat mengakibatkan erosi identitas budaya, di mana nilai-nilai tradisional mulai dilupakan, mengakibatkan generasi muda kehilangan keterikatan dan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka. Selain itu, rendahnya pemahaman budaya dapat melemahkan kohesi sosial, meningkatkan potensi konflik antar kelompok etnis, dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian budaya. Akibatnya, elemen-elemen budaya yang berharga berisiko hilang tanpa ada upaya yang memadai untuk melestarikannya. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan budaya menjadi sangat penting untuk menjaga keberagaman dan stabilitas sosial di Kota Makassar. Perlunya dihadirkan “PERAN KELOMPOK SOSIAL” yang memiliki kedudukan dan status, sehingga antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan, karena satu sama lain ada ketergantungan. Kehadiran Peran Kelompok Sosial disini adalah Pemerintah Kota Makassar terkhusus Dinas Kebudayaan Kota Makassar.

Menyelenggarakan **Forum Dialog** oleh dinas kebudayaan merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat komunikasi dan pemahaman antar kelompok budaya di masyarakat multikultural seperti Kota Makassar. Forum ini berfungsi sebagai ruang di mana berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemimpin etnis, seniman, dan warga biasa, dapat berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu budaya yang relevan. Tujuannya adalah untuk menciptakan dialog yang konstruktif, di mana setiap kelompok memiliki kesempatan untuk menyuarakan pandangan mereka dan mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang ada.

Selain itu, forum dialog yang diselenggarakan oleh dinas kebudayaan juga berperan dalam membangun jaringan kerjasama yang lebih kuat antar komunitas budaya. Dalam forum ini, berbagai kelompok etnis dapat berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan yang serupa, seperti bagaimana menjaga identitas budaya di tengah modernisasi atau bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam kehidupan sehari-hari yang lebih modern. Forum dialog dengan melibatkan seluruh *Stakeholder* juga membuka peluang untuk kolaborasi lintas budaya, yang dapat menghasilkan program-program budaya yang lebih inklusif dan representatif bagi seluruh

masyarakat. Dengan demikian, dinas kebudayaan tidak hanya berperan sebagai fasilitator dialog, tetapi juga sebagai katalisator dalam menciptakan kebijakan dan program yang mendukung kerukunan dan keberagaman budaya di Kota Makassar.

2. Masyarakat belum mengetahui arti dari bulan kebudayaan dan segala hal yang serupa yang diinisiasi pemerintah Kota Makassar terkhusus dinas Kebudayaan Kota Makassar. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya Bulan Kebudayaan dapat menghambat upaya pelestarian budaya, karena masyarakat tidak menyadari nilai dan manfaat yang dapat diperoleh dari keterlibatan aktif dalam kegiatan tersebut. Akibatnya, kesempatan untuk membangun kesadaran budaya, memperkuat kohesi sosial, dan mempromosikan kebanggaan akan warisan budaya lokal menjadi terlewatkan, yang dapat memperlemah keberlanjutan budaya di masa depan. Seringnya diadakan sosialisasi kepada Masyarakat terkait bulan kebudayaan, juga merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk memberikan pemahaman akan hadirnya bulan kebudayaan.

Sebagai bentuk perpanjangan tangan Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan Kota Makassar adalah terbentuknya **Duta Kebudayaan “Kembali”**. Hadirnya Duta Kebudayaan bisa menjadi suatu bentuk upaya pemerintah dalam memperkenalkan, budaya yang ada di Kota Makassar kepada dunia, agar tidak hilang dan tergerus dengan adanya modernisasi pengaruh budaya asing yang dengan cepat masuk dalam tatanan sosial bermasyarakat.

Mengingat sekarang merupakan era digitalisasi dimana media sosial telah menjadi platform utama untuk penyebaran informasi dan pembentukan opini publik, Peneliti merekomendasikan ***Influencer* penggiat media sosial sebagai Duta Kebudayaan** merupakan langkah strategis yang relevan dalam konteks zaman sekarang. *Influencer* memiliki jangkauan yang luas dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang merupakan pengguna utama media sosial. Dengan menggunakan bahasa dan format yang akrab bagi audiens mereka, *influencer* dapat mengkomunikasikan nilai-nilai budaya lokal dengan cara yang lebih *engaging* dan *relatable*. Konten yang mereka buat, seperti video pendek, vlog, dan infografis, dapat mempopulerkan elemen-elemen budaya tradisional dengan cara yang modern dan menarik, sehingga budaya tersebut tidak hanya dikenal, tetapi juga dihargai dan dihidupkan kembali oleh masyarakat.

Selain itu, *influencer* memiliki kemampuan untuk membangun komunitas digital di sekitar topik tertentu, yang memungkinkan penyebaran budaya lokal menjadi

lebih viral dan berdampak luas. Ketika *influencer* mempromosikan kebudayaan lokal, mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menginspirasi pengikut mereka untuk terlibat secara aktif, baik melalui partisipasi dalam acara budaya, mendukung produk lokal, atau bahkan mengadopsi praktik budaya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting karena dapat menciptakan efek domino, di mana semakin banyak orang yang terlibat dan peduli terhadap pelestarian budaya lokal. Dengan demikian, influencer dapat berperan sebagai agen perubahan yang efektif dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya di era digital.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penelitian diantaranya kendala sumber daya, kendala metodologi dan kendala sosial serta kultural. Mengidentifikasi dan memahami kendala-kendala ini penting untuk merancang strategi mitigasi yang efektif. Peneliti harus fleksibel dan kreatif dalam mengatasi tantangan yang muncul untuk memastikan penelitian tetap valid, reliabel, dan bermanfaat.

4.2 Implikasi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi untuk membantu dalam pengembangan teori ataupun model yang berhubungan dengan etnisitas dan integrasi dalam masyarakat multicultural. Hasil penelitian ini juga dapat menjadikan Pemerintah Kota Makassar mendapatkan informasi dalam mewujudkan Makassar menjadi “*Livable City*” dan “*Resilient City*” dan meningkatkan Kualitas infrastruktur Kota yang Nyaman dan Inklusif, serta meningkatkan Tata Kelola Hidup yang lestari.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Etnisitas mempengaruhi proses integrasi individu dalam masyarakat multicultural Kota Makassar, hal tersebut dapat dilihat dari: (1) pengetahuan masyarakat dalam hal kebudayaan yang masih rendah, sehingga dianggap perlu untuk memberikan informasi yang lebih luas dan mudah dijangkau sesuai dengan pemahaman yang dianggap perlu kepada masyarakat (2) Masyarakat belum mengetahui arti dari bulan kebudayaan dan segala hal yang serupa yang diinisiasi pemerintah Kota Makassar terkhusus dinas Kebudayaan Kota Makassar.
2. Hubungan antara integrasi individu dengan harmoni dan stabilitas dalam masyarakat multicultural Kota Makassar sudah berjalan cukup baik. Dengan berbagai suku yang ada di Kota Makassar juga terlihat harmonis dengan saling menghargai dan menghormati.

5.2 Rekomendasi

1. Perlu di hadirkan Peran Kelompok Sosial melalui Forum Dialog oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Kebudayaan. Melalui forum dialog yang melibatkan seluruh *stakeholder*, dinas kebudayaan dapat memfasilitasi terciptanya kesepakatan mengenai cara terbaik untuk memelihara dan mengembangkan warisan budaya lokal sambil mengakomodasi dinamika perubahan sosial. Hal ini juga merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan perlu komitmen bersama dari semua pihak untuk mencapai tujuan bersama, adanya kerjasama lintas sektoral antar dinas atau instansi di Kota Makassar dan diperlukan komitmen dan kerjasama dari pihak-pihak yang terkait
2. Pembentukan Kembali Duta Kebudayaan yang berasal dari influencer penggiat media sosial. Beberapa aplikasi sistem pendukung juga dapat digunakan seperti berbasis website dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS). Metode AHP bisa membantu untuk mengevaluasi kandidat berdasarkan berbagai kriteria yang dianggap penting, seperti pengetahuan budaya, kemampuan komunikasi, pengaruh di media sosial, dan dedikasi terhadap

pelestarian budaya. TOPSIS membantu menilai kandidat berdasarkan seberapa dekat mereka dengan solusi ideal (kandidat yang sempurna).

Penting untuk memastikan bahwa *influencer* yang dipilih memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya lokal dan komitmen untuk mempromosikan nilai-nilai yang benar-benar mencerminkan warisan budaya tersebut. Menggunakan *influencer* tanpa pengetahuan yang cukup dapat berisiko mengurangi makna dan esensi budaya, mengubahnya menjadi sekadar produk komersial yang kehilangan nilai-nilai otentiknya. Oleh karena itu, kolaborasi antara dinas kebudayaan dan *influencer* harus dilakukan dengan hati-hati, termasuk memberikan pelatihan dan panduan yang tepat kepada para *influencer* untuk memastikan bahwa pesan budaya yang disampaikan tetap akurat dan bermakna.

3. Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan *Advocacy Coalition Framework* adalah merupakan ilmu kebijakan *public* yang berada pada teori kebijakan *public* generasi “hybrid” yang menganalisis suatu kebijakan yang telah dirumuskan atau kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya, namun dalam implementasinya mengetahui perubahan-perubahan kebijakan. Artinya bahwa kebijakan ini pernah ada namun kembali ditiadakan karena dianggap tidak perlu atau dalam substansinya masih perlu ditelaah kembali keberadaanya. Maka dari itu melihat tingkat urgensi dari penelitian ini mengadakan Duta Kebudayaan adalah salah satu model rekomendasi kami untuk mendapatkan pola pengintegrasian masyarakat multicultural. Dengan harapan dapat menterjemahkan *Policy Core belief* kedalam program pemerintah dengan meningkatkan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, D. (2008) "Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar," *Media Tor (Jurnal Komunikasi)*, 9(2), hal. 301–316.
- Ahmadin (2013) *Dialektika Ruang dan Proses Produksi Sosial (Studi Sosiologi Pola Pemukiman Etnik Di Makassar)*. Universitas Hasanuddin.
- Baidhawry, Z. (2005) *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Diedit oleh Erlangga.
- Barth, F. (1993) *Balinese Worlds*. University Of Chicago Press.
- Durkheim, E. (1972) *Selected Writings*. Cambridge University Press.
- Harahap, N. (2020) "Adaptasi Berbasis Budaya dan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Etnis Tionghoa di Kota Palembang)," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), hal. 220–229.
- Indahni, Amelia;Casanti, R. M. (2022) "Memperdagangkan Alibi dalam Perkara Keterlibatan Korupsi Menggunakan Teori Anomie dari Emile Durkheim.," *Jurnal Humaya*, 2(1), hal. 21–33.
- Lukman; Widyastuti, S. S. (2024) "Bahasa Indonesia Sengai Produk Budaya dan Bagian Dari Bahasa Austronesia," *Kajian Linguistik dan Sastra*, 3.1, hal. 1–13.
- Martono, N. (2012) *Sosiologi perubahan sosial: Perspektif klasik, modern, posmodern, dan poskolonial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- POLUAKAN, Marcelino Vincentius, et al. (2019) "Potret generasi milenial pada era revolusi industri 4.0.," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2), hal. 187–197.
- Rochmawati, H. (2017) "Dinamika kelompok sosial budaya di Kota Makassar: Memudarnya stratifikasi sosial berbasis keturunan.," *Jurnal MAsyarakat dan Budaya*, 19(2), hal. 189–202.
- Rumahuru, Y. Z. (2020) *Ritual Sebagai Media Konstruksi Identitas : Suatu Perspektif Teoritis*.
- S.Bekti, I. (2018) "Etnografi komunikasi komunitas yang kehilangan identitas sosial dan budaya di Kabupaten Cilacap.," *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6.1, hal. 64–77.
- Siti, N. rezky juniarsih wildan dadan;Komariah (2023) "Kekuatan Budaya Lokal: Menjelajahi 3S (Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge') sebagai Simbol Kearifan Lokal," *MIMESIS*, 4.2, hal. 166–179.
- Sya'ban Andi Hilda (2020) *Eksistensi Batari Toja Daéng Talaga Dalam Konteks Sosial-Politik Bugis*. Universitas Hasanuddin.
- Syahnakri (2008) *Aku Hanya Tentara*. Penerbit Buku Kompas.
- TAHIR, H. (2013) "Stereotipisasi Etnis Makassar oleh TV One Melalui Tayangan Bentrok dan Tawuran di Makassar.," *jurnal Pekommas*, 16(2), hal. 95–104.
- Tajfel, H. . (2010) *Social identity and intergroup relations*. Cambridge University Press.
- Wahjudianata, Hadi, I. P. (2020) *Komunikasi Massa*. Diedit oleh K. Massa.
- YADNYA, IB Putra, Ardika, I. W. (2017) *Dinamika manusia dan kebudayaan Indonesia dari masa ke masa*. Pustaka Larasan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.,

LAMPIRAN

Lampiran 1

Susunan Organisasi Tim Peneliti / Pelaksana dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/ Minggu)	Uraian Tugas
1.	Dr. Maya Kasmita, S.STP.,M.A P	UNM	Administrasi Publik	7 Jam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendesain dan menyusun proposal 2. Melakukan persiapan dan pelaksanaan penulisan laporan 3. Membuat instrument penelitian 4. Melakukan analisis data 5. Melaksanakan penelitian 6. Merancang dan menyusun laporan penelitian

2.	Yusi Irensi Seppa, SE.,MM	UNM	Ilmu Manajeme n	7 jam	1. Melakukan persiapan surveilapangan 2. Membant u menyusu n instrume n penelitian
----	------------------------------------	-----	-----------------------	-------	---

					<p>3. Melaksanakan pengumpulan data</p> <p>4. Melakukan analisis data</p> <p>5. Membantu merancang dan menyusun laporan</p>
3.	St. Syarifah Wafiqah Wardah, SH.MH	UNM	Ilmu Hukum	7 JAM	<p>1. Membantu menyusun instrumen penelitian</p> <p>2. Melaksanakan pengumpulan data</p> <p>3. Melakukan analisis data</p> <p>4. Membantu merancang dan menyusun laporan</p>

Lampiran 2.

BIODATA TIM PENELITIAN / PELAKSANA (KETUA)

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Dr. Maya Kasmita, S.STP.,M.AP
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	NIP	19840818 200312 2 002
4.	NIDN	0018088407
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Polewali Mandar, 18 Agustus 1984
6.	E-mail	mayakasmita@unm.ac.id
7.	Nomor Telepon/HP	081241480800
8.	Alamat Kantor	Fakultas Ilmu Sosial (FIS) kampus UNM Gunungsari baru Jl. A. Pettarani Makassar
9.	Nomor Telepon/Faks	-

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri	Sekolah Tinggi Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	Universitas Negeri Makassar
Bidang Ilmu	Manajemen Aparatur	Administrasi Publik	Administrasi Publik
Tahun Masuk-Lulus	2003-2007	2008-2010	2016-2022
Judul Skripsi/tesis/disertasi	Pengaruh Kinerja Terhadap	Pengaruh Akad Kredit terhadap Pelayanan pada	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

	Pelayanan PrimaAparat pad aKantor Kecamatan Bontoala Kota Makassar	Bank Syariah Mandiri Cabang Bone	Kota Makassar
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Herman, M.Si Dr. Burhanuddin Dalil., M.Si	Prof. Dr. Makmur., M.Si Prof. Dr. Basri., M.Si	Prof. Dr. Suradi Tahmir.,M.S Prof. Dr. Rifdan.,M.Si

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Keterangan	
			Sumber Pendana an	Kedudukan dalam TIM
1	2022	Model Literasi Digital Marketing dalam Pengembangan Home Industri Kuliner	PNBP UNM	11.000.00 0
2	2023	Peran Dinas Koperasi Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil danMenengah Kota Makassar	PNB P UNM	13.000.00 0
3	2024	Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Pada Kluster Perlindungan Khusus DiKota Makassar	PNB P UNM	35.000.00 0

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Keteranga n	
			Sumber Pendana an	Kedudukan Dalam TIM
1	2023	Menyiapkan Generasi Emas Yang Sadar Hukum dan Berkarakter	Mandiri	Anggota

2	2022	Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara	Mandiri	Anggota
3	2022	Supporting Business Plan : Upaya Redesign Model Bisnis Bumdes Minasa Te'ne Berbasis Potensi Daerah di Desa Bontomanai Kabupaten Gowa	Mandiri	Anggota
	2022	PKM KELOMPOK USAHA MASYARAKAT (Pengolahan Makanan Barongko Warna Berbagai Rasa)	Mandiri	Anggota
	2023	Edukasi melalui Kegiatan Penyuluhan Pemanfaatan Digital Marketing di Lapas Kelas II b Takalar	Mandiri	Anggota
	2024	Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Kampanye Menjaga Lingkungan	PNBP	Ketua

No.	Judul Artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/ Tahun
1.	Characteristic s of the Problem of Implementing Solid Waste Policy in Rappocini District, Makassar City	PINISI BUSINES S ADMINIST RATION PREVIEW	https://ojs.unm.ac.id/PBAR/article/view/37465 NOVEMBER, 2022

2.	Implementation OfWaste Policy in Makassar City	AtlantisPress	http://eprints.unm.ac.id/21245/6/Implementation%20Of%20Waste%20Policy%20In%20Makassar%20City%208%25.pdf 2018
----	---	---------------	--

3.	Improving Dicipine of regional cipil servant	AtlantisPress	https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-18/25903977 2018
	Peningkatan Rasa Percaya diri MelaluiPublic Speaking	Joong-Ki	https://journal-nusantara.com/index.php/Joong-Ki/article/view/2485 2023
	Penyuluhan Dalam Mewujudkan Generasi Muda YangBerakakterdanSadar Hukum	Journal Nusantara	https://journal-nusantara.com/index.php/Joong-Ki/article/view/2465 2023
	Edukasi Melalui Kegiatan Penyuluhan Pemanfaatan DigitalMarketing di Lapas Kelas IIB Takalar	Jurnal Teknovokasi	https://journal.unm.ac.id/index.php/TEKNOVOKASI/article/view/498 2023
	Analysis of the Roleof Customer Servicein Improving Service Quality at Bank Rakyat Indonesia Takalala Unit Soppeng District	Pinisi Business AdministrationReview	https://ojs.unm.ac.id/PBAR/issue/view/2455 2023
	The Influence of Leadership Style and Organizational Culture on Performance (Studyon 'Indonesia Eximbank' Makassar RegionalOffice)	Pinisi Business AdministrationReview	https://ojs.unm.ac.id/PBAR/issue/view/2455 2023
	Pengembangan Bisnis Destinasi Wisata Rumede KabupatenPolman	J-CEKI : Jurnal Cendeki allmiah	https://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/issue/view/55 2023

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	International Conference on	Employee Performance Effectiveness at the	2019, Khon Khain Thailand

	Public Organization (ICONPO)	Education and Culture Office in Wajo Regency	
2.	International Joint Conference Social Science	Improving Discipline Of Regional Civil Servants	Surabaya, 2018
3.	International Joint Conference Social Science	Implementation Of Waste Policy In Makassar City	Surabaya, 2018
4.	Technology Development in Waste Management in Makassar City'	Technology Development in Waste Management in Makassar City	Makassar, 2023

G. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Pemanfaatan Tumbuhan Kelapa	2021	Karya Tulis	000289426

H. Penghargaan Yang pernah diraih


No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Satyalancana Karya Satya X tahun	Presiden RI	2014

I. Organisasi Profesi / Ilmiah

Tahun	Organisasi	Jabatan
2023-2027	Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia	Anggota

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian PNBP.

Makassar, 12 Februari
2024 Tim Pengusul,


Dr. Maya Kasmira, S.STP., M.AP
Nip. 19840818-200312-2 002

BIODATA TIM PENELITIAN / PELAKSANA (ANGGOTA)

A. Identitas Diri Anggota

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Yusi Irensi Seppa, S.E.,M.M
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP/NIK/Identitas Lainnya	198709052022032007
5.	NIDN	0005098708
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Majene, 5 September 1987
7.	E-mail	yusi.irensi.seppa@unm.ac.id
8.	Nomor Telepon/HP	085255340619
9.	Alamat Kantor	A.P. Pettarani No.- Makassar
10.	Nomor Telepon/Faks	

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar	
Bidang Ilmu	Manajemen Keuangan	Manajemen Sumber Daya Manusia	
Tahun Masuk-Lulus	2006-2010	2018-2020	
Judul Skripsi/tesis/disertasi	Pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman terhadap rentabilitas pada PT.Semen Tonasa	Analisis pengaruh kepemimpinan,budaya organisasi dan sistem kontrol terhadap kinerja organisasi pada Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr.Erlina Pakki Dr.Fauzi R.Rahim	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si Dr. Hj. Muliaty, M.AP	

C. Pengalaman pengabdian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2023	Edukasi melalui kegiatan penyuluhan Pemanfaatan digital marketing di Lapas Kelas II B Takalar	Mandiri	10.000.000
2.	2023	Peningkatan pemahaman mahasiswa Angkatan 2022 mengenai peramam OMBUDSMAN dalam pelayanan public di Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum UNM	Mandiri	10.000.000

D. Pengalaman penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2023	Dampak dari Persepsi Konsumen dan pengetahuan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian produk ramah lingkungan Tupperware di Kota Makassar	PNBP	27.500.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Penulis	Volume/Nomor/Tahun
1.	Analysis of the influence of leadership, organizational culture and control systems on organizational performance at hasanuddin university hospital	Yusi Irensi Seppa, Ansar, Muliaty, Pratiwi, Reski Dewi Yusriadi, Yusriadi Yusuf, Muhammad Lionardo, Andries Nasirin, Chairun	ISBN :9781792361241 ISSN : 21698767 Published: 7 November 2021
2.	The Effect of Communication Skills of Civil Servant in Public Service on Community Satisfaction	Andi Muhammad Rivai, Aris Baharuddin, Syarifuddin, Yusi Irensi Seppa, Yusri	DOI: doi.org/10.1051/shsconf/202214903029 Published: 18 November 2022
3.	Creativity Model in Improving Organizational Performance at Hasanuddin University Hospital Makassar	Yusi Irensi Seppa, Muh. Rizal S, Siti Syarifah Wafiqah Wardah, Aris Baharuddin, Andi Muhammad Rivai	Volume 9 Nomor 1 Tahun 2023
4.	Limitation of Freedom of Contract in Business Contract Drafting	Siti Syarifah Wafiqah Wardah, Muh. Rizal S, Yusi Irensi Seppa, Andika Wahyudi Gani, Maya Kasmita	Volume 9 Nomor 1 Tahun 2023

5.	The Impact of Consumer Knowledge in Making Decisions to Purchase Tupperware Environmentally Friendly Products in Makassar City	Muhammad Syukur, Yusi Irensi Seppa, Ibrahim Arifin	Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
6.	Prosedur Dalam Penetapan Harga Produk Pada PT. Mirota KSM	Yusi Irensi Seppa	Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023
7.	Penerapan Proses Transformasi Dalam Kegiatan Produksi Untuk Memaksimalkan Laba Pada PT. MIROTA KSM	Yusi Irensi Seppa	Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023
8.	PINISI Discretion Review (2022): Improving Marketing Performance through Digital Marketing for MicroBusiness Actors in the Trade Sector Registered at the Cooperatives and SMEs Service Office	Aris Baharuddin , Wahyuni Sulviana Oudina , Yusi Irensi Seppa , Nur Astaman Putra , Ahmad Syarief Iskandar	Volume 5, Issue 2 March March 2022 DOI : 10.26858/pdr.v5i2.32443
9.	The Impact of Consumer Perception on Buying: Decision Process of Environment-friendly Tupperware Products in Makassar City	Muhammad Syukur, Yusi Irensi Seppa, Ibrahim Arifin	2024

10.	Artikel PKM Penguatan Pemahaman Mahasiswa Terhadap Peran Ombudsman Dalam Pelayanan Publik Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar	Andi Muhammad Rivai, Yusi Irensi Seppa, Siti Syarifah Wafiqah Wardah, Andi Tenri Ola Rivai, Andi Akram Nur Risal	VOKATEK Volume 01 Nomor 03 Oktober 2023
11.	Artikel PKM : Sosialisasi Panduan Pemanfaatan Sistem Informasi Prodi Ilmu Administrasi Bisnis	Yusi Irensi Seppa, Muhammad Rizal, Maya Kasmita, Siti Syarifah Wafiqah Wardah, Dyan Paramitha Darmayanti, Andi Muhammad Rivai, Aris Baharuddin	ININNAWA: Jurnal Pengabdian Masyarakat: Vol. 01, No.01, April 2023
12.	Artikel PKM : Sosialisasi Peningkatan Peran Penasihat Akademik Kepada Mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas Negeri Makassar	Siti Syarifah Wafiqah Wardah, Muh. Rizal Suyuti, Yusi Irensi Seppa, Maya Kasmita, Fitriani Dzulfadhilah	TEKNOVOKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat: Vol. 1, No.2, Mei 2023

13.	Artikel PKM Edukasi Melalui Kegiatan Penyuluhan Pemanfaatan Digital Marketing di Lapas Kelas IIB Takalar	Yusi Irensi Seppa, Maya Kasmita, Muhammad Luthfi Siraj, Aris Baharuddin, Siti Syarifah Wafiqah Wardah	Volume 1 No.3, September 2023
-----	---	---	----------------------------------

F. Seminar Nasional dan Internasional

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Penulis	Ket.
1.	Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management: Analysis of the influence of leadership, organizational culture and control systems on organizational performance at hasanuddin university hospital	Yusi Irensi Seppa, Ansar, Muliaty, Pratiwi, Reski Dewi Yusriadi, Yusriadi Yusuf, Muhammad Lionardo, Andries Nasirin, Chairun	ISBN :9781792361241 ISSN : 21698767 Published: 7 November 2021
2.	Prosiding Seminar SHS Web of Conferences 149, 03029 (2022): The Effect of Communication Skills of Civil Servant in Public Service on Community Satisfaction	Andi Muhammad Rivai, Aris Baharuddin, Syarifuddin, Yusi Irensi Seppa, Yusri	DOI: doi.org/10.1051/shsconf/202214903029 Published: 18 November 2022
3.	3rd International Conference on Humanities Education, Law and Social Sciences (3rd ICHELSS): The Impact of Consumer Perception on Buying: Decision Process of Environment-friendly Tupperware Products in Makassar City	Muhammad Syukur, Yusi Irensi Seppa, Ibrahim Arifin, Nizar Amalia Amanhy Damayanti Putri Zahwa Biantika Balqis	2023

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. Perolehan KHI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman meruskan kebijakan publik/rekayasa sosial lainnya dalam 5 tahun terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa sosial lainnya yang telah diterapkan	Tahun	Tempat penerapan	Respon Masyarakat

J. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi pemberi penghargaan	Tahun

Semua data yang diisikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan usulan Program.

Makassar, 5 Januari 2024

Pengusul



Yusi Irensi Seppa, S.E., M.M
NIP. 198709052022032007

A. Identitas Diri Anggota

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Siti Syarifah Wafiqah Wardah, S.H., M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	199608072022032016
5	NIDN	0007089602
6	Tempat, Tanggal Lahir	Ujungpandang, 07 Agustus 1996
7	E-mail	syarifah.wafiqah@unm.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	085341663349
9	Alamat Kantor	Jl. Andi Pangeran Pettarani Gunung Sari
10	Nomor Telepon/Faks	0411 869834-860468/ Fax 868794
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 2 orang; S-2 =0 orang; S-3 =0orang
12	Nomor Telepon/Faks	-
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum & Etika Bisnis 2. Hubungan Industrial 3. Hukum Perusahaan 4. Pengantar Ilmu Hukum 5. PKn 6. Pendidikan Pancasila

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UMI	UMI	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk-Lulus	2014-2018	2018-2020	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Peran Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam Pelaksanaan Peningkatan hak atas Tanah dari Status HGB dan Hak Pakai Menjadi Hak Milik	Kedudukan dan Kekuatan Hukum Nota Kesepahaman (MoU) ditinjau dari segi Hukum Pejanjian dalam KUHPerdara	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. H. Muhammad	Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H	

	Kamal Hidjaz, S.H., M.H		
--	----------------------------	--	--

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan skripsi, tesis dan disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2023	Implementasi Aplikasi Online Elektronik-Office Direktorat Jenderal Perbendaharaan (e-DJPb) Di Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar	PDUPT	15.000.000

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2022	Sosialisasi Pengikatan Pemahaman Peran Penasihat Akademik Kepada Mahasiswa Ilmu Administrasi Bisnis UNM	Mandiri	1.000.000
2	2023	Peningkatan Motivasi Wirausaha Bagi Warga Binaan Lapas Kelas IIB Takalar	Mandiri	10.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	<i>THE STATUS OF THE LAW OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING REVIEWED FROM ALL THE LEGAL AGREEMENTS IN CODE OF CIVIL LAW</i>	Meraja Journal	Vol 3, No. 2, Juni 2020
2	<i>Characteristics of the Problem of Implementing Solid Waste Policy in Rappocini District, Makassar City</i>	Phinisi Business Administration Review	Vol 4, No. 2, September 2022
3	<i>Limitation of Freedom of Contract in Business Contract Drafting</i>	Jurnal Office: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran	Volume 9, Number 1, January-June 2023, 9-16
4	<i>Creativity Model In Improving Organizational Performance At</i>	Jurnal Office: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi	Volume 9, Number 1, January-June 2023, 1-8

	<i>Hasanuddin University Hospital Makassar</i>	Perkantoran	
5	Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap KlausulaEksonerasi dalam Kontrak Baku Menurut Undang-undang No 8 tahun1999	Jurnal Ilmu AdministrasiBisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (JADBISFISH)	Vol. 2, No. 3, September 2023, Pages 283-290
6	<i>The Meaning of Beauty in Phenomonological PerspectiveAmong Students of Universitas NegeriMakassar</i>	Social Landscape Journal	Volume 4 Nomor 3 November, 2023

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halama n	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa SosialLainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerap an	Respon Masyarakat

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau institusi lainnya)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Makassar, 12 Februari 2024

,



Siti Syarifah Wafiqah
Wardah, S.H.,M.H.,
NIP. 197501272015041001

DOKUMENTASI



SURAT



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar 90111

Makassar, 21 Agustus 2024

Nomor : 070/697/BPPD/VIII/2024
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Dr. Maya Kasmita, S.STP., M.AP dan Tim

Di -

Makassar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Tim Peneliti untuk berkenan hadir dalam pelaksanaan kegiatan Seminar Hasil yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 26 Agustus 2024
Waktu : 13.00 WITA – selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar
(Lantai 2 Balaikota)
Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar
Agenda : Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan “Etnisitas dan Integrasi dalam Masyarakat Multikultural Kota Makassar”

Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu Tim Peneliti, diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP.

NIP. 497304252005021001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani Makassar No. 2 90111 Telp (0411) 316940 Fax (0411) 333952

Makassar, 15 Maret 2024

Nomor : 070/294/BPPD/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Dr. Maya Kasmita, S.STP., M.AP dan Tim
Di -
Makassar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Tim Peneliti untuk berkenan hadir dalam pelaksanaan kegiatan Seminar Proposal yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 22 Maret 2024
Waktu : 13.30 WITA – selesai
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar
(Lantai 2 Balaikota)
Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar
Agenda : Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan "Etnisitas dan Integrasi dalam Masyarakat Multikultural Kota Makassar"

Demikian disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu Tim Peneliti, diucapkan terima kasih.

KEPALA BALITBANGDA,


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 197304252005021001

Tembusan :

1. Bapak Wali Kota Makassar (Sebagai Laporan) di Makassar ;
2. Peringgal